

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 telah dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini disusun secara simultan dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2021, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Semoga Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melakukan tugasnya.

Jakarta, 17 Juni 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Landasan Hukum.....	I-3
I.3 Maksud dan Tujuan	I-5
I.3.1 Maksud	I-5
I.3.2 Tujuan.....	I-5
I.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	II-1
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur	II-1
II.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Timur	II-7
II.2.1 Sumber Daya Manusia	II-7
A. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	II-7
B. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	II-8
C. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-8
D. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	II-9
II.2.2 Aset/Modal (Umum).....	II-10
II.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2018-2021.....	II-39
II.3.1 Capaian Indikator Kinerja	II-39
II.3.2 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2018-2021	II-42
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur	II-43
II.4.1 Tantangan	II-44
II.4.2 Peluang	II-50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	III-1
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur	III-1
A. Permasalahan Makro Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur	III-1
B. Permasalahan Pelayanan Pada Masing-Masing UKPD di Kota Administrasi Jakarta Timur.....	III-2
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	III-6
III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-11

A. Penataan Kawasan 1.000 Danau	III-11
B. Penataan Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung	III-12
C. Penataan Kawasan Eco Wisata Cipayung	III-14
III.4 Penentuan Isu-isu Strategis	III-16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
V.1 Strategi	V-2
V.2 Arah Kebijakan	V-3
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Kota Adm Jakarta Timur	I-3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur	II-5
Gambar 3.1 Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025....	III-9
Gambar 3.2 Kawasan 1.000 Danau	III-12
Gambar 3.3 Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung	III-13
Gambar 3.4 Layout Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung	III-13
Gambar 3.5 Kawasan-Kawasan Eco Wisata Cipayung	III-15
Gambar 3.6 Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur ...	III-16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyederhanaan Jabatan Pengawas Menjadi Jabatan Fungsional	II-76
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	II-7
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	II-8
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-8
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	II-10
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur	II-39
Tabel 2.7 Realisasi Program Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2018-2021 ...	II-44
Tabel 2.8 Jumlah Kelurahan yang mengalami Bencana Banjir Tahun 2019-2021	II-44
Tabel 2.9 Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan di Kota Administrasi.....	II-45
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi ...	III-2
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	III-3
Tabel 3.3 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025.....	III-11
Tabel 3.4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur	III-17
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur	IV-1
Tabel 5.1 Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal.....	V-1
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur.....	V-4
Tabel 6.1 Rekap Jumlah Program, Indikator Program, Unit Pelaksana dan Jumlah Kegiatan Per Program	VI-3
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	VI-4
Tabel 7.1 Indikator Kota Administrasi Jakarta Timur	VII-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi tidak hanya kepada hasil tapi juga manfaat yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur disusun secara simultan dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) digunakan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama periode empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis bermanfaat bagi masyarakat Jakarta Timur khususnya dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya.

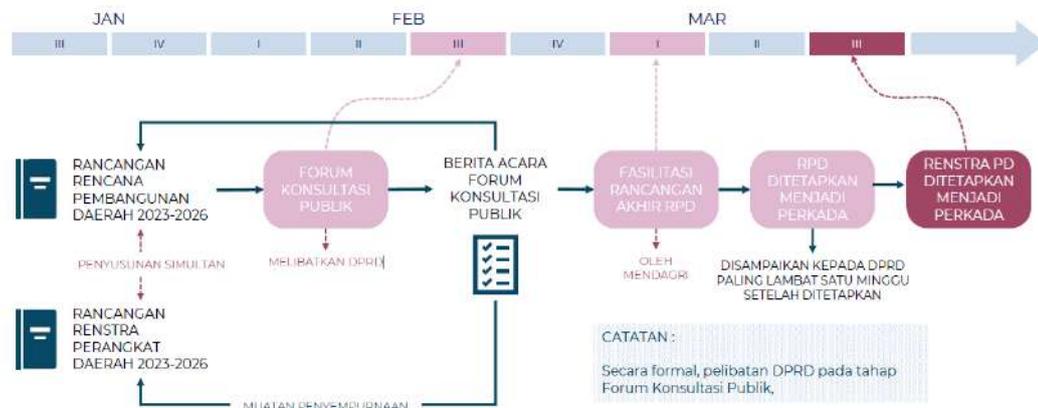
Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur.

Adapun bagan alur penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

TIMELINE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2021



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2023-2026

3

Dengan disusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2023-2026 maka seluruh entitas Kota Administrasi Jakarta Timur diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur) dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kota Administrasi Jakarta Timur dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

I.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026, sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
18. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Fungsional.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam periode 2023-2026;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan fungsinya.

I.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur.

I.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kota Adm Jakarta Timur

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Timur; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur.

- II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kota Adm Jakarta Timur
- II.2. Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Timur
- II.3. Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur
- II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis.

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur
- III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025
- III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Bab ini menguraikan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Timur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

Tugas

Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
4. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;

9. pengordinasian, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
10. pengordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
11. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
12. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
13. pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
14. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
15. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
16. fasilitasi pengordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang terutang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
17. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.
18. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi :

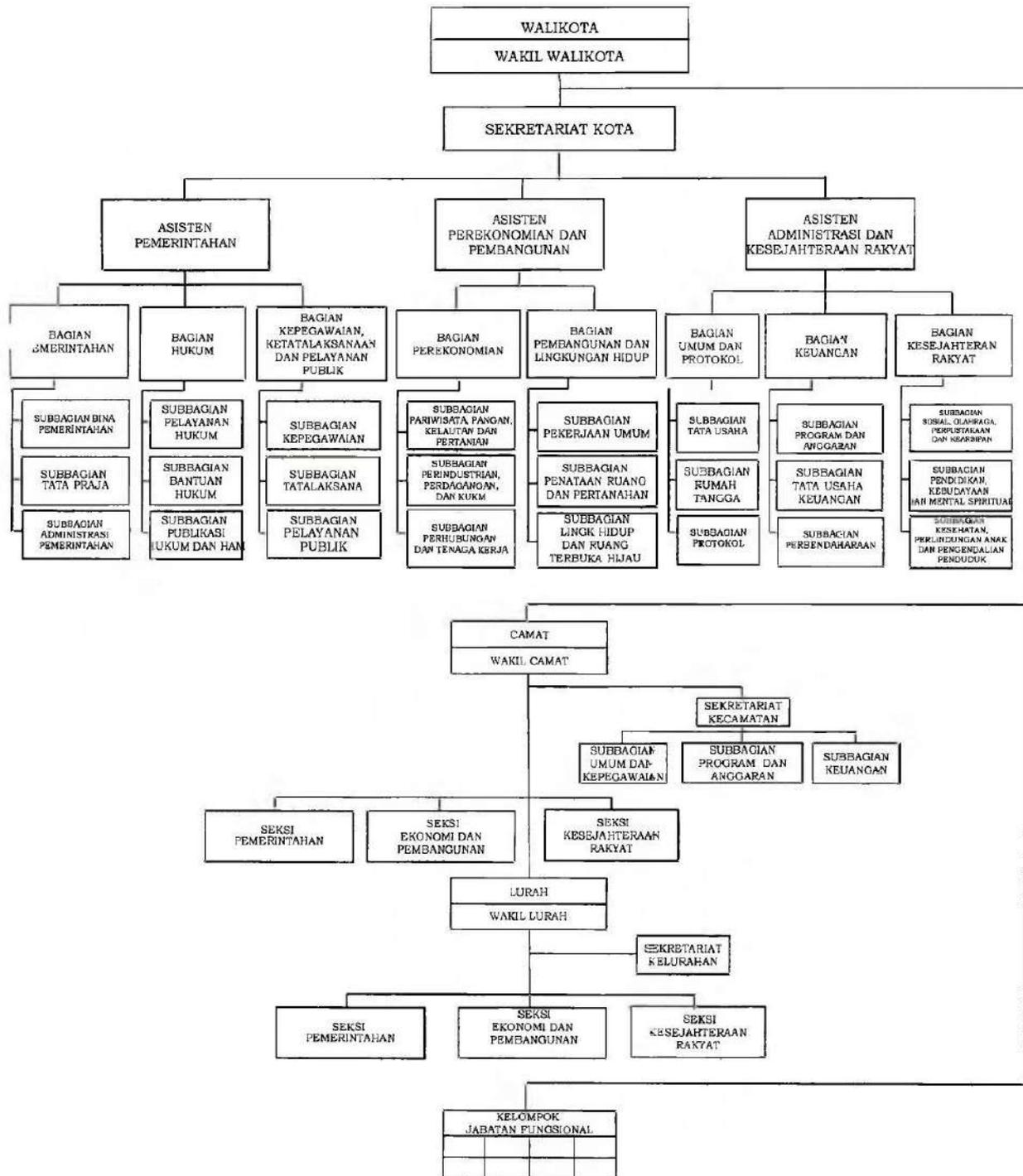
1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. kesehatan;
3. sosial;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. ketenteraman dan ketertiban umum; dan
6. koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Sekretariat Kota, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pemerintahan;
 - 2) Sub Koordinator Tata Praja; dan
 - 3) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pelayanan Hukum;
 - 2) Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
 - 3) Sub Koordinator Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Kepegawaian;
 - 2) Sub Koordinator Tatalaksana; dan
 - 3) Sub Koordinator Pelayanan Publik.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pariwisata, Pangan , Kelautan dan Pertanian;
 - 2) Sub Koordinator Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Sub Koordinator Perhubungan dan Tenaga Kerja.
 - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pekerjaan Umum;
 - 2) Sub Koordinator Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan; dan
 - 3) Sub Koordinator Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.
 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan

- 3) Subbagian Protokol.
- b) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Program dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2) Sub Koordinator Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan
 - 3) Sub Koordinator Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
- d. Kecamatan, terdiri dari :
1. Camat;
 2. Wakil Camat;
 3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 4. Seksi Pemerintahan;
 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 7. Kelurahan, terdiri dari :
 - a) Lurah;
 - b) Wakil Lurah;
 - c) Sekretariat Kelurahan;
 - d) Seksi Pemerintahan;
 - e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 terjadi penyederhanaan birokrasi dalam bentuk penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur mengalami penyederhanaan Jabatan Administrasi pada level jabatan pengawas sebanyak 18 jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional seperti pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Penyederhanaan Jabatan Pengawas Menjadi Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan Sebelum Penyederhanaan	Nama Jabatan Setelah Penyederhanaan
1	Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Bina Pemerintahan
2	Kepala Sub Bagian Tata Praja	Analisis Kebijakan Kepala Subbagian Tata Praja
3	Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum	Analisis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum
4	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Analisis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum
5	Kepala Sub Bagian Publikasi Hukum Dan Ham	Analisis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum
6	Kepala Subbagian Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Kepegawaian
7	Kepala Subbagian Tatalaksana	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Tata Laksana
8	Kepala Subbagian Pelayanan Publik	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Publik
9	Kepala Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pariwisata, Pangan, Kelautan Dan Pertanian
10	Kepala Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
11	Kepala Subbagian Perhubungan Dan Tenaga Kerja	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Perhubungan Dan Tenaga Kerja
12	Kepala Subbagian Pekerjaan Umum	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pekerjaan Umum
13	Kepala Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan
14	Kepala Subbagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Lingkungan Hidup Dan Ruang Terbuka Hijau
15	Kepala Subbagian Program Dan Anggaran Perencana	Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Program Dan Anggaran
16	Kepala Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan Dan Kearsipan	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Sosial, Olahraga, Perpustakaan Dan Kearsipan
17	Kepala Subbagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Mental Spiritual	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pendidikan, Kebudayaan Dan Mental Spiritual
18	Kepala Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Kesehatan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur

II.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Timur

II.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2022, jumlah pegawai di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 995 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.2 di bawah ini, jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 363 orang (36,48%). Selanjutnya urutan kelompok umur dengan komposisi jumlah pegawai terbanyak adalah kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 181 orang (18,19%), kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 164 orang (16,48%), kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 129 orang (12,96%), kelompok umur 41- 45 tahun sebanyak 106 orang (10,65%), serta kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 34 orang (3,42%). Adapun kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 20-25 tahun, yaitu sebanyak 18 orang (1,81%). Berdasarkan penjelasan tersebut yang perlu diantisipasi adalah banyaknya pegawai di usia >50 tahun yang akan memasuki masa pensiun dalam periode mendatang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat Kota Adm Jakarta Timur	2	7	22	22	17	18	38	126
2	Kecamatan Cakung	1	3	12	20	6	16	32	90
3	Kecamatan Cipayung	2	2	18	20	8	9	55	114
4	Kecamatan Ciracas	1	5	14	10	5	12	28	75
5	Kecamatan Duren Sawit	6	2	11	19	7	14	40	99
6	Kecamatan Jatinegara	2	3	5	20	10	16	34	90
7	Kecamatan Kramat Jati	1	1	11	11	11	16	38	89
8	Kecamatan Makasar	1	2	11	10	7	14	23	68
9	Kecamatan Matraman		1	8	16	12	13	22	72
10	Kecamatan Pasar Rebo	1	5	8	15	11	14	20	74
11	Kecamatan Pulo Gadung	1	3	9	18	12	22	33	98
	TOTAL	18	34	129	181	106	164	363	995

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur

B. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.3 dapat diketahui bahwa paling banyak pegawai menempati golongan III sebanyak 755 orang (75,88%), kemudian pegawai yang menempati golongan II sebanyak 157 orang (15,78%), sedangkan yang menempati golongan IV sebanyak 77 orang (7,74%). Adapun sisanya menempati golongan I sebanyak 6 orang (0,60%).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Kota Adm Jakarta Timur	1	13	88	24	126
2	Kecamatan Cakung		15	71	4	90
3	Kecamatan Cipayung		20	88	6	114
4	Kecamatan Ciracas	3	11	56	5	75
5	Kecamatan Duren Sawit		12	82	5	99
6	Kecamatan Jatinegara	1	18	68	3	90
7	Kecamatan Kramat Jati	1	11	72	5	89
8	Kecamatan Makasar		9	51	8	68
9	Kecamatan Matraman		13	55	4	72
10	Kecamatan Pasar Rebo		17	53	4	74
11	Kecamatan Pulo Gadung		18	71	9	98
	TOTAL	6	157	755	77	995

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur

C. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 421 orang (42,31%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan DIII sebanyak 188 orang (18,89%), SMA sebanyak 187 orang (18,79%), S2 sebanyak 91 orang (9,15%), DIV sebanyak 61 orang (6,13%), SMP sebanyak 28 orang (2,81%), D2 sebanyak 10 orang (9,15%), SD sebanyak 7 orang (0,70%) dan D1 sebanyak 2 orang (0,20%).

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	Sekretariat Kota Adm Jakarta Timur		1	13		1	21	7	58	25	126
2	Kecamatan Cakung			19			23	4	40	4	90
3	Kecamatan Cipayung	1	1	27	1		19	3	46	16	114

No	Kecamatan/	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan									Jumlah
4	Kecamatan Ciracas	2	1	15			19		32	6	75
5	Kecamatan Duren Sawit	1		19			18	6	47	8	99
6	Kecamatan Jatinegara		1	23	1		15	2	46	2	90
7	Kecamatan Kramat Jati	1	1	15			16	1	48	7	89
8	Kecamatan Makasar			15			14	1	30	8	68
9	Kecamatan Matraman	1	21			9	5	33	3		72
10	Kecamatan Pasar Rebo		1	14			16	1	34	8	74
11	Kecamatan Pulo Gadung	1	1	27			22	3	37	7	98
TOTAL		7	28	187	2	10	188	61	421	91	995

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur*

Dapat disimpulkan bahwa pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur didominasi oleh mereka yang berpendidikan S1, D3, SMA dan S2 yaitu sebanyak 89.15%, sehingga secara umum dapat dikatakan tingkat pendidikan pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur sudah memadai, atau dengan kata lain 89.15 pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

D. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk Kecamatan dan Kelurahan, pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 410 orang. Sedangkan sisanya adalah fungsional pelaksana 551 orang dan fungsional tertentu 34 orang.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Unit Kerja	Jabatan					Jumlah
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Pelaksana	
Sekretariat Kota Adm Jakarta Timur	3	11	6	34	72	126
Kecamatan Cakung		3	39		48	90
Kecamatan Cipayung		2	43		69	114
Kecamatan Ciracas		3	29		43	75
Kecamatan Duren Sawit		3	41		55	99
Kecamatan Jatinegara		2	44		44	90
Kecamatan Kramat Jati		3	39		47	89
Kecamatan Makasar		3	30		35	68
Kecamatan Matraman		2	33		37	72
Kecamatan Pasar Rebo		3	28		43	74
Kecamatan Pulo Gadung		3	37		58	98
TOTAL	3	38	369	34	551	995

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur

II.2.2 Aset/Modal (Umum)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, selain didukung oleh tingkat kemampuan sumber daya manusianya, juga harus didukung dengan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi tanah dan bangunan gedung Kantor Walikota, 10 Kantor Kecamatan dan 65 Kantor Kelurahan, termasuk juga rumah dinas untuk Walikota, para Camat dan para Lurah.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur secara jumlah ada yang sudah mencukupi dan ada yang belum mencukupi kebutuhan kinerja pelayanan. Secara kualitas masih banyak kondisi sarana prasarana yang kurang layak dan tidak layak. Berdasarkan tingkat kelayakannya, maka semua sarana dan prasarana yang dikelola Kota Administrasi Jakarta Timur memerlukan pemeliharaan rutin, perbaikan ringan, sedang dan berat serta diusulkan penghapusan untuk asset yang sudah tidak layak dan penggantian (dan atau penambahan) yang baru. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

I. BANGUNAN KANTOR WALIKOTA

Luas Lahan : 55000 m2

NO	BLOK	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN RENOVASI TERAKHIR	KONDISI FISIK			JUMLAH LIFT	KETERANGAN
						RB	RS	RR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A	59719	8	1979				v	4	
2	B1/B2	8105	4	1993				v	0	
3	C	1549	2	2010				v	0	
4	D	27556	16	2006				v	7	

II. LIFT

NO	BLOK	TAHUN PENGADAAN	JENIS PEMELIHARAAN	JUMLAH LIFT	KAPASITAS ANGKUT	KONDISI FISIK			JUMLAH LANTAI	KETERANGAN
						RB	RS	RR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A	2019	Pemeliharaan Rutin	4	@ 1000kg				8	
2	D	2006	Pemeliharaan Rutin	7	@ 1350 kg				16	

III. RUMAH DINAS WALIKOTA/BUPATI

Luas Lahan

: 814 m²

NO.	A L A M A T	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI		TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN RENOVASI TERAKHIR	KONDISI FISIK			KETERANGAN
			RB	RS			RR			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Jalan Taman Simanjuntak Timur RT. 011 RW.03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur	1043,7	2		1979	2021				

IV. BANGUNAN KANTOR CAMAT DAN LURAH

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifikat	LUAS		TAHUN PEMBANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Kecamatan Matraman	JL. Balai Rakyat Kelurahan Utan Kayu Utara		2.161	2.504	2005	4			v		
1	Kel. Pal Meriam	Jl. Kayumanis I Lama RT.007 RW.08		720	720	1995	4			v		
2	Kel. Kayu Manis	Jl. Kayu Manis VIII RT.08 RW.08 Kelurahan Kayu Manis		752	1.067	2018	4					
3	Kel. Pisangan Baru	Jl. Pisangan Baru Utara RT.008 RW.014		935	935	1991	3					
4	Kel. Utan Kayu Utara	Jl. Kemuning No. 42		650	1.000	2014	4					
5	Kel. Kebon Manggis	Jl. Kebon Manggis I Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Kebon Manggis		1.506	715	2014	3			v		
6	Kel. Utan Kayu Selatan	Jl. Galur Sari Timur No .1		1.362	1.113	2014	3					

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifi- kat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Kecamatan Jatinegara	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 8 RT. 013 RW. 001 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	163	6.846	2.479	2012	4	2021		v		
1	Kel. Rawa Bunga	Jalan Jatinegara Timur IV Kelurahan Rawa Bunga	SHP No.50	1.132	350	2009	3	2018		v		
2	Kel. Cipinang Cempedak	Jl.Otista III Rt.003/05	163	487	2.797	1980	3		v			
		Jl. Panti Asuhan No.3	-		1.377	2010	3	2019		v		
3	Kel. Cipinang Besar Utara	Jl. Swadaya No. 2 Rt. 006/014 Kel.Cipinang Besar Utara		2.790	1.000	1992	3			v		Sertifikat sedang diurus dan belum pernah di rehab
4	Kel. Bidara Cina	Jl. Tanjung Lengkong No. 30 RT 04 RW 07, Kel Bidara Cina Kec. Jatinegara		1.000	512	2013	4				v	Belum berserti- fikat
5	Kel. Kampung Melayu	Jl. Kebon Pala I/32 RT 03 RW.05 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur		468	664	2018	4					
6	Kel. Cipinang Muara	Jl. Cipinang Muara Raya No.1 RT. 02/03 Kel. Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara , Jakarta Timur	163	1.544	782	2012	3	2012				
7	Kel. Bali Mester	Jl Jatinegara Barat II No 19		450	666	2018	4					
8	Kel. Cipinang Besar Selatan	Jl. TPU Kebon Nanas Rt 002/05 Kel. Cipinang Besar Selatan	No. Sertifikat Gedung Belum Ada.	1	1	2017	3	Belum Pernah Direhab				BAST Gedung Kantor No. 482/-076.2 Tanggal 28 Mei 2019

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifi- kat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	Kecamatan Kramat Jati	Jl. Raya Bogor KM 20 RT 014/011	SHP 18 TAHUN 1981	2.931	3.600	2006	4			v		
1	Kel. Cawang	Jl. Ja'ani Nasir Rt. 001/010 No. 7 Kelurahan Cawang	SHP No. 106	5.617	800	2007	3	2018		v		Rehab ringan
2	Kel. Cililitan	Jl. Mandala V Gg. Ali Sarbi II RT.007/09 Kel. Cililitan	88	1.100	500	2012	3	2018		v		
3	Kel. Kramat Jati	Jl Kerja Bhakti No 32 Rt 002 Rw 05		1.248	680	1995	3			v		
4	Kel. Batu Ampar	Jl. Batu Ampar II RT 006 Rw 03 Kelurahan Batu Ampar	SKPD tidak memiliki Dokume n Surat Sertifikat	1.000	800	2012	3	2012				sudah bersurat Kepada Suban Pengelola an Aset Daerah Kota Administra si Jakarta Timur, untuk mengusul- kan pembuat- an sertifikat pada tahun 2018 tepatanya tanggal 19 Sept 2018
5	Kel. Bale Kambang	Jl. Pucung Rt. 009 Rw.02 Kel. Balekambang	No.9	973	800	2018	4			v		

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifikat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Kel. Tengah	Jl. Masjid Al-Bariyyah RT. 011/04	SHP No.7	2.400	1.000	2004	3			v		
7	Kel. Dukuh	Jl. Dukuh V RT. 007 RW. 02	SHP No. 5 Tahu 1984	1.145	1.145	1984	3	2018		v		lantai 3 bocor, cat tembok bagian luar sudah mulai rontok, lantai ubin sudah mulai rusak
IV.	Kecamatan Pulo Gadung	Jl. Raya Bekasi KM 18 RT.001/04 Kel Jatinegara Kaum		481	14.144	2004	4	2021			v	
1	Kel. Pulo Gadung	Jl. Kayu Putih IV Kelurahan Pulogadung		1.188	995		4					
2	Kel. Pisangan Timur	Jl. H. Mugeni II No. 2 Kel. Pisangan Timur		1.000	600	1996	3					
3	Kel. Cipinang	Jl. Cipinang Empang 1		1.058	1.058	1988	4					
4	Kel. Kayu Putih	Jl.Genteng RT.03 RW 01	P.296/1 981	606	230	2017	4					
5	Kel. Jatinegara Kaum	Jl. TB Badaruddin N0.1 Tanah Koja		1.180	900	1999	3					
6	Kel. Jati	Jl Perhubungan Raya No. 79c	317	1.008	2.700	2001	3				v	Atap genteng rusak
7	Kel. Rawamangun	Jl. Rawamangun Muka Barat No.3 RT.009 Rw.12		2.307	504	2009	3					

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifi- kat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.	Kecamatan Pasar Rebo	Jl. Raya Bogor KM 27 RT 001/004 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo	SHP No.1	2.968	512	2005	4			v		
1	Kel. Gedong	Jalan H. Taiman No. 20 Rt. 2 Rw. 9 Kelurahan Gedong	SHP No.19/G edong	1.255	1.000	1997	3			v		
2	Kel. Cijantung	Jl. Gongseng Raya No. 88 RT 001/010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur		3.873	400	2011	3					
3	Kel. Kampung Baru	Jl. Puskesmas RT 008 RW 01 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo		1.500	1.000	2009	3					
4	Kel. Kalisari	JL.KALISARI RT.011 RW.02 KEL. KALISARI KEC. PASAR REBO	SHP NO. 00089/ 2014	894	713	2013	4			v		
5	Kel. Pekayon	Jl. Madrasah Rt.003/09 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	SHP No.10	2.333	636	2006	3	2019				perbaikan ubin lantai 3 dan kamar mandi lantai 3
VI.	Kecamatan Cakung	JL. Raya Bekasi KM 23 RT 01 RW 02 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur 13910		-	1.684	1999	4			v		
1	Kel. Jatinegara	Jl. Raya Bekasi KM 18 RT 005 RW 011 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur		739	-	2020	4					
2	Kel. Rawaterate	Jl.Dr.KRT.Radjiman Widyodiningrat RT.002 RW.04 Rawaterate		1.182	1.182	-	3	2012				

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifi- kat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Kel. Penggilingan	Jl. Komplek PIK RW 10 Kel. Penggilingan		1.777	1.000	2005	3			v		
4	Kel. Cakung Barat	Jl.Tipar Cakung Pool PPD Depo C Kelurahan Cakung Barat		1.175	600	1992	3			v		
5	Kel. Cakung Timur	Jl. Balai Rakyat Kel.Cakung Timur		3.817	144	1999	3			v		
6	Kel. Ujung Menteng	Jl. Raya Bekasi Km. 26 RT. 007/01		1.000	-	1995	3			v		
7	Kel. Pulo Gebang	Jl Raya Pulo Gebang Rt 006 Rw 003		1.200	550	2020	5					
VII.	Kecamatan Duren Sawit	Jl. Swadaya VIII No. 1 RT.8/RW 1 Kel. Duren Sawit	SHP No.699	3.055	1.212	2012	4		v			
1	Kel. Klender	Jl.Bulak Timur 1/12 RT 08 RW 016, Kel. Klender	SHP NO. 243/KL ENDER tanggal 03/10/1988	3	900	2010	3	2010		v		-
2	Kel. Pondok Bambu	Jl. H. Mutholib RT 004 RW 003 Kel Pondok		130	130	1980	1		v			
		Jl. Pahlawan Revolusi		861	300	1980	1			v		
3	Kel. Duren Sawit	Jalan Kelurahan Raya Nomor 41		4.000	800	2000	3	2018		v		

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifi- kat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Kel. Malaka Sari	Jalan Raya Malaka No.122 Rt.04 Rw.08 Kelurahan malaka sari. Kec.duren sawit		1.200	780	2014						
5	Kel. Malaka Jaya	Jl. Teratai Putih Raya No. 1 Kel. Malaka Jaya		1.050	1.200	2002	3			v		
6	Kel. Pondok Kopi	Jalan Arabika III Blok W.7 RT.009/006		970	814	2016	4				v	
7	Kel. Pondok Kelapa	Jl. H. Dogon Timur I/32 RT.016 RW.02 Kel.Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	P.13/19 83	902	850	2008	3	2019		v		Rehab lantai 1
VIII.	Kecamatan Makasar	Jalan Lembur No. 1 RT. 012 / RW. 06 Kelurahan Makasar	Belum sertifikat	3.654	876	2014	4	2014				
1	Kel. Cipinang Melayu	Jl. Inspeksi Tarum Barat No. 1 RT 001 RW 010 Kalimalang Jakarta Timur	Sertifikat Hak Pakai No.13 situasi No. 2646/19 85	2.762	714	2007	3			v		
2	Kel. Halim Perdana Kusuma	Jl. Squadron RT. 010 RW. 05 No.1A Kel. Halim Perdanakusuma		1.435	945	2001	3					

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifi- kat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Kel. Kebon Pala	Jl.Jengki Cipinang Asem RT.011 RW.04 Kel.Kebon Pala Kec.Makasar		1.800	1.000	2009	3					
4	Kel. Makasar	Jalan Gelanggang Olahraga Remaja RT 011 RW 06 Kelurahan Makasar		1.558	213	2013	3					
5	Kel. Pinang Ranti	Jl. SMA Negeri 48 RT.014 RW.001 Kelurahan Pinang Ranti		1.254	197	2008	3	2018		v		yang direhab hanya di lantai 3
IX.	Kecamatan Ciracas	Jl. Penganten Ali No. 9 Rt 008/006 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas		3.628	2.376	2015	4			v		
1	Kel. Susukan	Jl. H. Baping RT 010/006 Kel. Susukan, Kec. Ciracas	SHP NO 10	2.340	879	2007	3			v		
2	Kel. Rambutan	Jl. Gudang Air No. 36 Rt. 005 Rw. 02 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas	33 tahun 1985	3.106	884	2011	3					
3	Kel. Kelapa Dua Wetan	Jl.Raya PKP RT.001 RW 08 Kel.Kelapa Dua Wetan		1.590	500	2019	4					
4	Kel. Ciracas	Jl. Raya Ciracas RT 007 RW 03 Kel. Ciracas	13	4.196	750	2003	3	2019		v		Mengguna kan anggaran Kelurahan
5	Kel. Cibubur	Jl. Raya lapangan Tembak RT 05 RW 02 Kel. Cibubur		2.626	700	1999	3					

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	No Sertifi- kat	LUAS		TAHUN PEMBA NGUN- AN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KET.
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.	Kecamatan Cipayung	Jl. Bina Marga No.2 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur		6.000	2.456	2014	4	2019				
1	Kel. Lubang Buaya	Jl. SPG7 RT 06/09 Kel. Lubang Buaya kec. Cipayung		1.500	900	1975	3					
2	Kel. Bambu Apus	Jl. Mini III RT 012 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung		2.578	371	2013	3					
3	Kel. Setu	Jl. Raya Setu RT 005 Rw 001		1.390	1.390	2011	3					
4	Kel. Cipayung	Jl Bambu Hitam no 103 RT 010 RW 04 Kel/Kec Cipayung		2.319	796	2010	3					
5	Kel. Cilangkap	Jl. Raya As Syafiiyah No 1 Rt 003 Rw 03		3.000	900	2000	3					
6	Kel. Munjul	Jl. Buni No. 1 RT.001 RW.004 Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur		1.000	800	2011	3					
7	Kel. Pondok Ranggon	Jl. Pondok Ranggon RT.001/04 Kel. Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung		3.055	4.963	2018	3					
8	Kel. Ceger	Jl. SMPN 160 RT 002 RW 05 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur		1.080	774	1990	2					

V. RUMAH DINAS CAMAT DAN LURAH

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	PEMANFAATAN (DIHUNI/TIDAK DIHUNI)	LUAS		TAHUN BANGUN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Kecamatan Matraman	JL. Kebon Kelapa Utan Kayu Selatan		162	66		1					
II.	Kecamatan Jatinegara	Jl. K1 No. 2A RT. 011 RW. 003 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	Dihuni	500	130	1985	1	2018		√		
1	Kel. Rawa Bunga	Jalan Komplek Pendidikan	Tidak dihuni	288	70		1	1984		√		Belum pernah direhab
2	Kel. Cipinang Besar Utara	Jl. Cipinang Pulo Rt. 012/012 Kel. Cipinang		390	150	1994	1			√		Sertifikat sedang diurus dan belum pernah di rehab
3	Kel. Bidara Cina	Komplek Rumah Dinas Kec. Jatinegara (di Kel. Rawa Bunga) RT 02 RW 07 Kel. Rawa Bunga Kec Jatinegara	Dihuni	288	70	2009	1			√		
4	Kel. Kampung Melayu	Jl. Komplek Pendidikan Rawa Bunga RT 02/07 Kel. Rawa Bunga Ke. Jatinegara, Jakarta Timur		110	100		1		√			
5	Kel. Bali Mester	Jl Komplek Pendidikan		288	70		1				√	
6	Kel. Cipinang Besar Selatan	Jl. Cipinang Pulo Maja No. 7 Rt 015/011 Kel. Cipinang Besar Utara	TIDAK DIHUNI	320	91	1997	1	Belum Pernah Direhab	√			
1	Kel. Cawang	Jl. Jengki Cipinang A Kelurahan Kebon Pala	Dihuni	150	150		1	2013	√			Dimanfaatkan untuk menyimpan peralatan PPSU Kel.Kebon Pala
2	Kel. Cililitan	Jl. Olah Raga 2 RT.012/05	Tidak huni	300	126	2008	1	2017			√	
3	Kel. Batu Ampar	Jl. Batu Ampar II Rt 008 Rw 03	Tidak huni	110	200	1999	1		√			

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	PEMANFAATAN (DIHUNI/TIDAK DIHUNI)	LUAS		TAHUN BANGUN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Kel. Bale Kambang	Jl.Gardu Rt.007Rw.02 Kel. Balekambang	Dihuni	887	470		1			√		
IV.	Kecamatan Pulo Gadung	Jl. Balai Pustaka Baru I RT.07/07 Kel. Rawamangun		436	130		1				√	
1	Kel. Pulo Gadung	Jl. Balai Pustaka Baru I RT.07/07 Kel. Rawamangun		346	150		1		√			
2	Kel. Pisangan Timur	Jl. Balai Pustaka Baru I RT.07/07 Kel. Rawamangun		195	78		1		√			
3	Kel. Kayu Putih	Jl.Balai Pustaka Baru I Kel.Rawamangun	Tidak dihuni	450	176	1988	1				√	
4	Kel. Jati	Jl Balai Pustaka Baru No 20 Kel Rawamangun		215	90		1				√	
5	Kel. Rawamangun	Jl. Balai Pustaka Baru I No.20 Kel. Rawamangun		301	72		1				√	
V.	Kecamatan Pasar Rebo	Jl.Kalisari III Rt.008/010 Kel. Kalisari Kec.	Dihuni	500	200	1997	1				√	
1	Kel. Gedong	Jalan Kesehatan RT. 4 RW. 11 Kel. Gedong	Dihuni	150	90	1970	1				√	
2	Kel. Cijantung	Jl. Stadion Mini RT.008 RW.02, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur		300	100		1					
3	Kel. Kalisari	JL. H. ENJONG RT.008 RW.01 KEL. KALISARI KEC. PASAR REBO	Dihuni	206	120	1995	1			√		

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	PEMANFAATAN (DIHUNI/TIDAK DIHUNI)	LUAS		TAHUN BANGUN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Kel. Pekayon	Jl. Lapan Rt.009/01 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	tidak dihuni	352	108	1999	1	2015		√		Rehab sedang
VI.	Kecamatan Cakung	JL. Raya Bekasi KM 23 RT 01 RW 02 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur 13910		-	122		1				√	
1	Kel. Jatinegara	Jl. Taruna II RT. 005 RW. 011 Kel. Jatinegara		180	180		1				√	
2	Kel. Penggilingan	Jl. Raya Penggilingan RT 015 RW 007 Kel. Penggilingan		165	100		1					
3	Kel. Cakung Barat	Jl.Inpres Rt 001 Rw 07		250	150		1				√	
4	Kel. Ujung Menteng	Jl. Raya Bekasi Km. 26 RT. 015/01		100	-		1		√			
VII.	Kecamatan Duren Sawit	Jl. Swadaya Raya RT.8/RW 5 Duren Sawit kota Jakarta Timur	Dihuni	600	-		1			√		
1	Kel. Klender	Jl.Pertanian Tengah RT 015 RW 02 No.1	Dihuni	171	70	1975	1	1975		√		-
2	Kel. Pondok Bambu	Jl. H. Mutholib RT 004 RW 003 Kel Pondok Bambu		130	130		1		√			
		Jl. Pahlawan Revolusi		861	300		1				√	
3	Kel. Duren Sawit	Jalan Serdang RT.001 RW.012	Tidak dihuni	100	80		1	2018	√			

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	PEMANFAATAN (DIHUNI/TIDAK DIHUNI)	LUAS		TAHUN BANGUN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Kel. Malaka Sari	Jalan Taman Malaka Blok D.7 No.13-14 RT.011 RW. 09 Kel.Malaka Sari Kec. Duren Sawit		180	-							Belum ada bangunan
5	Kel. Pondok Kopi	Jl.Bina Karya RT.005/003 Kel.Pondok Kopi, Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur		400	400		1		√			
6	Kel. Pondok Kelapa	Jl. H. Dogon Timur I/32 RT.016 RW.02 Kel.Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	Dihuni	300	160	2008	1		√			Ditempatkan untuk Posko Bencana dan Gudang Peralatan PPSU
VIII.	Kecamatan Makasar	Jl. Jengki RT. 004 / Rw. 09 No. 1D Kelurahan Kebon Pala	Dihuni	399	118	1994	1	1994			√	
1	Kel. Halim Perdana Kusuma	Jl. Squadron RT. 010 RW. 05 No. 1A Kel. Halim Perdanakusuma		516	80		1					
2	Kel. Kebon Pala	Jl.Jengki Cipinang Asem RT.011 RW.04 Kel.Kebon Pala		1.800	180		1				√	Satu hamparan dengan tanah Kantor Kelurahan Kebon Pala
3	Kel. Makasar	Jl. Kerja Bakti RT 001/ RW 02 Kelurahan Makasar		310	59		1					
4	Kel. Pinang Ranti	Jl. Raya Pondok Gede RT.008 RW.002 Kel. Pinang Ranti		217	58		1		√			

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	A L A M A T	PEMANFAATAN (DIHUNI/TIDAK DIHUNI)	LUAS		TAHUN BANGUN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TER- AKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX.	Kecamatan Ciracas	Jl. Lapangan Tembak Rt 003/002 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas		399	134		1		√			
1	Kel. Susukan	Jl. Suci Gang Rudin RT 004/003 Kel. Susukan Kec. Ciracas		161	66	12/31/2008	1				√	
2	Kel. Rambutan	Jl. H. Jenih Rt. 012 Rw. 01 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas	Tidak dihuni	150	60	1975	1				√	
3	Kel. Kelapa Dua Wetan	Jl. Raya Kelapa Dua Wetan RT.001/06 Kel. Kelapa Dua Wetan		300	100		1				√	
4	Kel. Cibubur	Jl. Masjid RT 02 RW 04 Kel. Cibubur	Dihuni	450	54	1999	1				√	dihuni PPSU
X.	Kecamatan Cipayung	Jl. Raya Cilangkap Rt.004/01 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur	Dihuni	800	110	1994	1	2020				
1	Kel. Setu	Jl. Damai RT 6/1		475	475		1				√	
2	Kel. Cipayung	Jl Pinang RT 001 RW 04 kel/Kec Cipayung		207	63		1					
3	Kel. Cilangkap	Jl. Setu Cipayung Rt 007 Rw 04		200	200		1		√			
4	Kel. Munjul	Gg. Kapuk No. 5 RT.006 RW.007 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur		200	160		1		√			
5	Kel. Pondok Ranggon	Jl. Raya Pondok Ranggon RT.002/03		306,58	100		1		√			

VI. ASSET LAINNYA (LAHAN)

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Taman Simanjuntak Timur RT. 011 RW.03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara		814 m2	Rumah Dinas	
2	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Jatinegara Barat No. 142 Rt. 008 Rw. 01, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara		6166 m2	Komplek Suku Dinas	
3	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Dr. Sumarno No. 1 RT. 011 RW. 08, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung		55000 m2	Bangunan Kantor Walikota Jaktim	
4	Kota Administrasi Jakarta Timur	Perumahan Eramas 2000 Blok D1 Jalan Sentra Primer Timur, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta		4863 m2	Fasos Fasum	
5	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Tambun Rengas RT. 001 RW. 08, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	873/2011 dan 14/06/2011	5893 m2	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI) Kewaj	
6	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Tambun Rengas RT. 001 RW. 08, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	873/2011 dan 14/06/2011	6524 m2	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI) Kewaj	
7	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Tambun Rengas RT. 001 RW. 09, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	486/-1.711.534 dan 27/03/2009	626 m2	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI) Kewaj	
8	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Tambun Rengas RT. 001 RW. 09, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	486/-1.711.534 dan 27/03/2009	626 m2	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI) Kewaj	
9	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Tambun Rengas RT. 001 RW. 09, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	486/-1.711.534 dan 27/03/2009	1681 m2	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI) Kewaj	
10	Kecamatan Matraman	Jl.Balai Rakyat Kel.Utan Kayu Uatra	7 dan 26/08/1996	2161 m2	Kantor Kecamatan Matraman	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11	Kecamatan Matraman	Jl. Kebon Kelapa Utan Kayu Selatan		162 m2	Rumah Dinas Camat	
12	Kel. Pal Meriam	Jl. Tegalan RW.03	Sertifikat Hak Pakai	138 m2	Balai Warga RW. 04 (untuk kepentingan	
13	Kel. Pal Meriam	Jl. Kayumanis I Lama RW.08		720 m2	Kantor Kelurahan	
14	Kel. Kayu Manis	Jl. Kayu Manis VIII No.32 RT.08/08	167 dan 25/02/2010	710 m2	Kantor Kelurahan Kayu Manis	
15	Kel. Pisangan Baru	Jl. Pisangan Baru RT.007 RW.014		935 m2	Kantor Kelurahan Pisangan Baru	
16	Kel. Pisangan Baru	Utan Kayu Selatan		60m2	Rumah Dinas Lurah	
17	Kel. Utan Kayu Utara	Jl. Utan Kayu Raya	115 dan 28/03/1981	359 m2	Ex. Kantor Lurah	
18	Kel. Kebon Manggis	Jalan Kebon Manggis I, RT. 001, RW. 03	25 dan 28/03/1981	220 m2	TAMAN	
19	Kel. Kebon Manggis	Jl. Kebon Manggis I, RT. 001, RW. 02		1501.5 m2		
20	Kel. Utan Kayu Selatan	Jl. Galur Sari Timur No 1		50 m2	Bangunan Kantor	
21	Kel. Utan Kayu Selatan	Jl. Galur Sari Timur No 1		51 m2	Kantor	
22	Kel. Utan Kayu Selatan	Jl. Galur Sari Timur No 1	188 dan 21/07/1997	1362 m2	Kantor	
23	Kecamatan Jatinegara	Jl. K. 1 No 2A Rt 011 Rw 003, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13420		500 m2	Rumah Dinas Camat Kecamatan Jatinegara	
24	Kecamatan Jatinegara	Jl. DI. Panjaitan Rt 013 Rw 001, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13340	M. 163 Cipinang Cempedak dan 03/02/1997	6846 m2	Kantor Camat Kecamatan Jatinegara	
25	Kel. Rawa Bunga	Jl. Jatinegara Timur IV RT. 002 RW.07		1132 m2	Kantor kelurahan	
26	Kel. Rawa Bunga	Jl. Komp. Pendidikan RW. 02 Rw. 07		288 m2	Rumah Dinas	
27	Kel. Cipinang Cempedak	Jl. Otista III Komp. VI RT. 003/05	378 dan 25/02/1986	487 m2	Ex Kantor Kelurahan	
28	Kel. Cipinang Besar Utara	Jl. Swadaya No. 2 Rt. 006/014 Kel. Cipinang Besar Utara		2790 m2	Kantor	
29	Kel. Cipinang Besar Utara	Jl. Swadaya No. 2 Rt. 006/014 Kel. Cipinang Besar Utara		3766 m2	Kebun	
30	Kel. Cipinang Besar Utara	Jl. Cipinang Pulo Rt. 012/012 Kel. Cipinang Besar Utara		390 m2	Rumah Dinas	
31	Kel. Cipinang Besar Selatan	Jl. Tpu Kebon Nanas Rt 011 Rw 005, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13410		1406 m2	Kantor Lurah Cipinang Besar Selatan	
32	Kel. Cipinang Besar Selatan	Jl Cipinang Pulo Maja Nomor 7 Rt 015 Rw 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara	AJB No.73/Jt.NEGARA dan 25/04/1994	320 m2	TANAH RUMAH DINAS LURAH	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
33	Kel. Bidara Cina	Jl. Tanjung Lengkong No 30 RT 04 RW 07, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330		1000 m2	Kantor Kelurahan Bidara Cina	
34	Kel. Bidara Cina	Jl. Sensus, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330	227 dan 05/02/1996	34935 m2	Selama dipergunakan untuk kepentingan	
35	Kel. Kampung Melayu	JL. Kebon Pala I/32	56 dan 01/01/1970	468 m2	Kantor Kel.Kp.Melayu	
36	Kel. Kampung Melayu	Komplek Pendidikan Rawa Bunga	no.7	110 m2	Rumah Dinas	
37	Kel. Cipinang Muara	Jl. Cipinang Muara Raya No.1 RT.002/03	163 dan 28/03/1981	1544 m2	Kantor Lurah	
38	Kel. Bali Mester	Jl. Bekasi Timur, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara	7 dan 21/04/1983	288 m2	Rumah Dinas	
39	Kel. Bali Mester	Jl. Jatinegara Barat II /19 Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara		450 m2	Kantor Lurah	
40	Kecamatan Kramat Jati	Jl. Raya Bogor KM 20 RT.14 RW.11 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati	SHP Nomor 18 Tahun dan 28/03/1981	2931 m2	Tanah Kantor Camat Kramat Jati	
41	Kecamatan Kramat Jati	Jl. Dato Tonggara RT.14 RW.11 No.2 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati	SHP Nomor 19 Tahun dan 28/03/1981	292 m2	Tanah Rumah Dinas Camat	
42	Kel. Cawang	Jl Jaani Nasir No 7 Rt 001/010	SHP/No.106/CAWANG dan 27/06/1984	5617 m2	Kantor Lurah	
43	Kel. Cililitan	Jl. Olahraga II / Rt 012 Rw 005	-	300 m2	Rumah Tinggal	
44	Kel. Cililitan	Jl. Raya Bogor Rt 001 Rw 015		3 198 m2	Kantor Seksi	
45	Kel. Cililitan	Jl. Mandala V Rt 007 Rw 009		88 1150 m2	Kantor Kelurahan	
46	Kel. Kramat Jati	Jl. Nusa 1 Kramat Jati	28/03/1981	821 m2	untuk kegiatan Posyandu	
47	Kel. Kramat Jati	Jl. Kerja Bakti No. 30		400 m2	RUMAH DINAS LURAH	
48	Kel. Kramat Jati	Jl. Kerja Bakti No. 30		1248 m2	KANTOR LURAH	
49	Kel. Kramat Jati	Jl. Kerja Bakti RT 002 RW 10		11405 m2	Digunakan sendiri / baru di bangun R	
50	Kel. Batu Ampar	Jl. Batu Ampar II, RT.008/03		110 m2	Rumah dinas	
51	Kel. Batu Ampar	Jl. Batu Ampar III, RT.012/02 Kelurahan Batu Ampar	1 dan 28/03/1981	469 m2	Pemadam dan kebakaran	
52	Kel. Batu Ampar	Jl. Batu Ampar II, RT.006/03 Kelurahan Batu Ampar		1000 m2	Kantor Lurah	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
53	Kel. Batu Ampar	Jl. Inerbang, RT.010/03 Kelurahan Batu Ampar		380 m2	Balai Sidang/Pertemuan	
54	Kel. Batu Ampar	Jl. Kinyang, RT. 012/04 Kelurahan Batu Ampar	8 tahun 1986 dan 08/04/1987	4000 m2	RPTRA MUARA CONDET	
55	Kel. Bale Kambang	Jl. Gardu RT. 007 Rw. 02 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati	3	887 m2	Kantor Lurah lama	
56	Kel. Bale Kambang	Jl. Gardu/Kober RT. 09 RW.02, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati	9	1000 m2	Kantor Kelurahan	
57	Kel. Tengah	Jalan Merpati / Jalan Inpres RT 002 RW 002 Kelurahan Tengah		1600 m2		
58	Kel. Tengah	Jl. Masjid Al Bariyah	7	2400 m2	Kantor kelurahan	
59	Kel. Dukuh	JL.DUKUH V RT007/02	SHP No.5/DUKUH dan 21/01/1984	1145 m2	Kantor Kelurahan Dukuh	
60	Kecamatan Pulo Gadung	Jl. Balai Pustaka Baru I RT. 07/07 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur 13220	508	436 m2	Rumah Dinas Camat	
61	Kecamatan Pulo Gadung	Jl. Raya Bekasi Km. 18 Rt. 001/04 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur 13250	41 dan 31/12/1975	4810 m2	Kantor Kecamatan Pulo Gadung	
62	Kel. Pulo Gadung	Jl. Sunter I RT 009 / 01 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur	2 dan 28/03/1981	399 m2	ex kantor kelurahan	
63	Kel. Pulo Gadung	Jl. Kayu Putih IV Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur	Blok Sub Blok 1-46 dan 31/12/2018	995 m2	kantor kelurahan	
64	Kel. Pulo Gadung	Jl. Balai Pustaka Baru RT 0011 / 05 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur	8 dan 31/12/1988	346 m2	Rumah Dinas	
65	Kel. Pulo Gadung	Jl. Perintis RT005/02 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung	Blok Sub Blok 02-05 dan 31/12/2018	403 m2	Ruang Terbuka	
66	Kel. Pulo Gadung	Jalan Kayu Mas Utara 1 RT 06 RW 09		1630 m2		
67	Kel. Pulo Gadung	Jalan Kayu Mas Utara 1 RT 06 RW 09		1100 m2		
68	Kel. Pisangan Timur	Jl. Cipinang Kebembem IV Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur	39/1981 dan 28/03/1981	324 m2	Digunakan oleh pihak lain	
69	Kel. Pisangan Timur	Jl. Pori Raya Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur		300 m2	Digunakan oleh Sudin Sosial Jakarta	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
70	Kel. Pisangan Timur	Jl. Balai Pustaka Baru I No. 2 RT. 007 RW. 007	511/1987 dan 12/11/1987	195 m2		
71	Kel. Pisangan Timur	Jl. H. Mugeni II Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur		1000 m2	Kantor Lurah Pisangan Timur	
72	Kel. Cipinang	Jl. Cipinang Empang Timur No.1	1070 dan 12/11/1987	1058 m2	Kantor Lurah	
73	Kel. Cipinang	Jl. Cipinang Baru No.22 Rt.0011/02	507 dan 28/03/1981	326 m2	Kantor BKM	
74	Kel. Kayu Putih	Jl.Genteng No.2	P.296/81 dan 28/03/1981	606 m2	Kantor Lurah	
75	Kel. Kayu Putih	Jl.Marmer Raya No.22	448/1988 dan 31/12/1988	1800 m2	Gedung Karang Taruna Puskesmas, Tama	
76	Kel. Kayu Putih	Jl.Balai Pustaka Baru I	12/1988 dan 31/12/1988	450 m2	Rumah Dinas	
77	Kel. Jatinegara Kaum	Jl. TB. Badaruddin Tanah Koja	SHP NO.34/Jatinegara Kaum dan 28/01/1999	1180 m2	Kantor Kelurahan	
78	Kel. Jati	Jl. Balai Pustaka baru no. 20, Kelurahan Rawamangun		215 m2	Rumah dinas Lurah Jati	
79	Kel. Jati	Jl. Alu-Alu No. 12 RT. 005 RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur	78	560 m2	Kosong	
80	Kel. Jati	Jl. Perhubungan Raya NO. 79C RT. 001 RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	317 dan 15/11/1983	1008 m2	Kantor kelurahan	
81	Kel. Rawamangun	Jl. Taman Jeruk No.1 Rw 07	SERTIPIKAT HAK PAKAI dan 31/12/1987	1301 m2	Karang Truna	
82	Kel. Rawamangun	Jl. Rawamangun Muka Barat No. 3 RT 009/012		2307 m2	Kantor Lurah Rawamangun	
83	Kel. Rawamangun	Jl. Balai Pustaka Baru I 20 RT.007 RW.07	506 dan 23/02/1987	301 m2		
84	Kecamatan Pasar Rebo	Jl. Raya Bogor KM 27 RT 001 RW 04 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo	1 dan 28/03/1981	2968 m2	Kantor Camat Pasar Rebo	
85	Kecamatan Pasar Rebo	Jl.Kalisari III Rt.008/010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur		500 m2	Rumah Dinas Camat Pasar Rebo	
86	Kel. Gedong	Jalan TB Simatupang Rt. 002 Rw. 08 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo		150 m2	ex. kantor lurah	
87	Kel. Gedong	Jalan Kesehatan Rt.004 Rw.011 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur 13760		150 m2	Rumah Dinas	
88	Kel. Gedong	Jalan H. Taiman No. 20 Rt.002 Rw.09 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur 13760		1255 m2		

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
89	Kel. Gedong	Jalan Kesehatan Rt. 004 Rw. 011 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur 13760		400 m2	Kantor Kelurahan	
90	Kel. Cijantung	Jl. Stadion Mini RT.008 RW.02, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur		300 m2	Rumah Dinas	
91	Kel. Cijantung	Jl. Kramat RT 003 RW.03, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	50 dan 12/12/2014	878 m2.	Karang Taruna	
92	Kel. Cijantung	Jl. Gongseng Raya No. 88 RT 001/010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	45 dan 11/09/2019	3873 m2	Bangunan Kantor	
93	Kel. Cijantung	Jl.Gongseng Raya No.88 RT.001 RW.010	44 dan 28/12/2007	127 m2		
94	Kel. Kampung Baru	Jl. H. Hasan RT 001 RW 09 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur	P.1/1983 dan 23/9/1983	305 m2	Ex. Kantor	
95	Kel. Kampung Baru	Jl. Serbaguna RT 002 RW 01 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur	Tidak ada Data	200 m2	Rumah Dinas	
96	Kel. Kampung Baru	Jl. Puskesmas RT 008 RW 01 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timu	P.3/1988 dan P.3/1988	1500 m2	Kantor Lurah	
97	Kel. Kalisari	Jl. H. Enjong Rt.008 Rw.01 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo		206 m2	Rumah Dinas Lurah	
98	Kel. Kalisari	Jl.Kalisari Rt.009 Rw.01 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo		175 m2	ex, kantor lurah	
99	Kel. Kalisari	Jl.Kalisari Rt.009 Rw.01 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo		175 m2	ex. balai desa	
100	Kel. Kalisari	Jl.Kalisari Rt.011 Rw.02 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo	89 dan 12/12/2014	894 m2	Kantor Lurah	
101	Kel. Kalisari	Jl.Guru Serih I Rt.011 Rw.010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo	11 dan 29/03/1999	4787 m2	Tanah Kosong	
102	Kel. Pekayon	Jl. Lapan RT.009/01 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	tidak ada dokumen	352 m2	Rumah Dinas Lurah	
103	Kel. Pekayon	Jl. Madrasah RT.003/09 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	10 dan 31/12/1988	2333 m2	Kantor Lurah	
104	Kecamatan Cakung	JL. Raya Bekasi KM 23 RT 001 RW 002 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur 13910	93/4258/1980 dan 16/12/1980	6450 m2	Kantor Lurah	
105	Kel. Jatinegara	Jl. Taruna II RT.005 RW.011 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung		180 m2	Rumah Dinas Lurah	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
106	Kel. Jatinegara	Jl. Raya Bekasi Km. 18 RT.005 RW.011 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	4 dan 28/01/1981	739 m2	Bangunan Kantor	
107	Kel. Rawaterate	JL.DR.KRT.Radjiman Widyodiningrat RT.002/04		182 m2	Rumah Dinas	
108	Kel. Rawaterate	Jl.DR.KRT.Radjiman Widyodiningrat RT.002/04		1182 m2	Kantor Lurah Rawa Terate	
109	Kel. Penggilingan	Jl.Raya Penggilingan rw 07, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur		165 m2		
110	Kel. Penggilingan	JL. Raya Penggilingan, Komplek PIK, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur		1777 m2		
111	Kel. Penggilingan	Komplek Perumahan Penggilingan Elok Blok A	06453/IX/1982	1304 m2	Tanah	
112	Kel. Penggilingan	Penggilingan	6453/IX/1982	2085 m2	Lahan Masjid Blok G10	
113	Kel. Penggilingan	Penggilingan	6453/IX/1982	364 m2	Lahan Kantor RW Blok G 10	
114	Kel. Penggilingan	Penggilingan	6453/IX/1982	5860 m2	Lahan SUK Blok A	
115	Kel. Cakung Barat	Jl. Inpres RT. 001/07 Kel Cakung Barat Kec. Cakung Kota Adm Jakarat Timur		250 m2	Rumah Tinggal	
116	Kel. Cakung Barat	Jl. Tipar cakung Pool PPD Depo C RT. 002/07 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Kota Adm Jakarta Timur		1175 m2	Perkantoran	
117	Kel. Cakung Timur	Jl. Balai Rakyat Kel.Cakung Timur		1000 m2	Kantor Kelurahan	
118	Kel. Cakung Timur	Jl.Pagar Jati Kp.Gempol RT.012/01 Kel.Cakung Timur Kec.Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	No.6 Tahun 1989 dan 9/12/1989	1500 m2	RPTRA	
119	Kel. Cakung Timur	Kp. Gempol RT.015/01		2000 m2	Tanah Kosong	
120	Kel. Cakung Timur	Perum Taman Pulo Gebang	3624/-1.711.5	856 m2	Tanah Kantor RW Blok B	
121	Kel. Cakung Timur	Perum Taman Pulo Gebang	3624/-1.711.5	970 m2	Tanah Sarana Karang Taruna Blok C	
122	Kel. Cakung Timur	Perum Taman Pulo Gebang	3624/-1.711.5	1382 m2	Tanah Sekolah TK Blok D	
123	Kel. Cakung Timur	Jalan Tambun Rengas RT.004 RW.008	873/2011	2262 m2	Taman Patung Semut	
124	Kel. Cakung Timur	Jl.Jakarta Garden City	873/2011	4831 m2	Jalan Perumahan JGC	
125	Kel. Cakung Timur	Jalan Tambun Rengas RT.004 RW.008	873/2011	1369 m2	Taman JGC	
126	Kel. Cakung Timur	Jalan Tambun Rengas		2476 m2		
127	Kel. Cakung Timur	Jalan Tambun Rengas		32840 m2		

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
128	Kel. Ujung Menteng	RT. 007/01 Kel. Ujung Menteng		1000 m2	Kantor Kelurahan Ujung Menteng	
129	Kel. Ujung Menteng	Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur		730 m2		
130	Kel. Pulo Gebang	Jl. Raya Pulo Gebang KM.4 Cakung Jakarta Timur		100 m2	Rumah Dinas	
131	Kel. Pulo Gebang	Jl. Raya Pulo Gebang KM.4 Cakung Jakarta Timur		1160 m2	Kantor Kelurahan	
132	Kecamatan Duren Sawit	Jl. Swadaya Raya, RT.8/RW.5, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440		600 m2	Rumah Dinas Camat Duren Sawit	
133	Kecamatan Duren Sawit	Jl. Swadaya VIII No.1, RT.8/RW.1, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440	699 dan 10/06/1991	3055 m2	Kantor	
134	Kecamatan Duren Sawit	Jl. Swadaya VIII No.1, RT.8/RW.1, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440		2600 m2	Lapangan Parkir	
135	Kel. Klender	Jl.Pertanian Tengah RT 015 RW 02 No.1 Kel. Klender Kec. Duren Sawit		171 m2	Rumah Dinas Lurah Klender	
136	Kel. Klender	JL.Bulak Timur 1/12 RT 08 RW 016, Kel. Klender Kec. Duren Sawit	246 dan 14/11/1986	2547 m2	Kantor Lurah	
137	Kel. Klender	Jl. Dermaga Raya No 27A Jakarta Timur	SK GUB NO 941 dan 30/05/2014	1011 m2	PPAPP Provinsi DKI Jakarta	
138	Kel. Pondok Bambu	Jl. H. Mutholib RT 004 RW 003 Kel Pondok Bambu		130 m2	Rumah Dinas	
139	Kel. Pondok Bambu	Jl. Pahlawan Revolusi	56 dan 13/12/1980	861 m2	Rumah Dinas & Kantor Dewan Kelurahan	
140	Kel. Pondok Bambu	Jl. Pahlawan Revolusi No 147	715 dan 03/10/1988	4573 m2	Kantor Lurah	
141	Kel. Duren Sawit	Jl. Serdang RT 01/12		100 m2	Rumah Dinas	
142	Kel. Duren Sawit	Jl. Serdang RT 01/12	51/DUREN SAWIT dan 28/06/1983	590 m2	Rumah Dinas	
143	Kel. Duren Sawit	Jl. Kelurahan Raya No.41 Duren Sawit		4000 m2	Kantor Lurah	
144	Kel. Malaka Sari	Jl. Raya Malaka 122		1200 m2	Kantor Kelurahan	
145	Kel. Malaka Sari	Jl. Taman Malaka Utara Blok D.7 No.13-14 RT.011/RW.09	Super Pelepasan Hak Atas Tanah dan 18/10/1995	180 m2		
146	Kel. Malaka Jaya	Jl. Teratai Putih Raya No. 1		1050 m2	TANAH KANTOR KELURAHAN MALAKA JAYA	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
147	Kel. Malaka Jaya	Jl. Raya Bunga Rampai blok P 23 kev No 24	197 dan 25/10/1999	325 m2	di Bangun RPTRA	
148	Kel. Malaka Jaya	Jl. Raya Bunga Rampai Blok P 23 kEV No 18	203 dan 25/10/1999	189 m2	di Bangun RPTRA	
149	Kel. Malaka Jaya	Jl. Raya Bunga Rampai Blok P. 23 Kav No 17	2014 dan 25/10/1999	188 m2	di Bangun RPTRA	
150	Kel. Malaka Jaya	Jl. Raya Bunga Rampai blok P 23 Kev No 22	201 dan 28/10/1999	192 m2	di Bangun RPTRA	
151	Kel. Malaka Jaya	Jl. Raya Bunga Rampai Blok F 23 Kav No 21	200 dan 25/10/1999	192 m2	di Bangun RPTRA	
152	Kel. Malaka Jaya	Jl. Raya Bunga Rampai Blok F 23 Kav No 23	198 dan 25/10/1999	191 m2	di Bangun RPTRA	
153	Kel. Malaka Jaya	Jl. Raya Bunga Rampai Blok P 23 Kev No 19	202 dan 25/10/1999	191 m2	di Bangun RPTRA	
154	Kel. Malaka Jaya	Jalan Raya Bunga Rampai Kel. Malaka Jaya	199 dan 25/10/1999	192 m2	di Bangun RPTRA	
155	Kel. Pondok Kopi	I.Arabika III Blok W.7 Rt.009/06		970 m2	Kantor	
156	Kel. Pondok Kelapa	Jl. H. Dogon Timur I/32		300 m2	Rumah Dinas	
157	Kel. Pondok Kelapa	Jl. H. Dogon Timur I/32	P.13/1983 dan 23/09/1983	902 m2	Kantor	
158	Kel. Pondok Kelapa	Jl. Janur 2 Billy&Moon		5000 m2	Gedung Kosong	
159	Kel. Pondok Kelapa	Komplek DKI RT. 016 RW. 02		200 m2	Balai Pertemuan	
160	Kel. Pondok Kelapa	Jl. H. Dogon Timur		2500 m2	Taman Hutan Kota	
161	Kecamatan Makasar	JL. Lembur No. 1 RT 012 RW 06		3684 m2	Kantor	
162	Kecamatan Makasar	Jl. Jengki RT 004 RW 09 No. 1D		399 m2	Rumah Dinas	
163	Kel. Cipinang Melayu	Jl. Swadaya Rt 05 Rw 01 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar		201 m2	ex.ktr kelurahan (dipakai Sekretaris)	
164	Kel. Cipinang Melayu	Jl. Wirajasa 2 No.8 Rt.010 Rw 07 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar	15/03/2018	8052 m2	Tanah Kosong	
165	Kel. Cipinang Melayu	Jl. Inspeksi Tarum Barat No.1 Kalimalang Jakarta Timur	10/02/1987	2762 m2	Kantor Kelurahan	
166	Kel. Cipinang Melayu	Jl. Elang thainesia III RT 003 RW 08 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar		2000 m2	Tanah Kosong	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
167	Kel. Halim Perdana Kusuma	Jl. Squadron 1A RT.10/RW.5, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur	7 dan 7/12/2004	516 m2	Rumah Dinas	
168	Kel. Halim Perdana Kusuma	Jl. Squadron 1A RT.10/RW.5, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur	7 dan 7/12/2004	1435 m2	Kantor	
169	Kel. Kebon Pala	Jl. Kamboja, RT.10 RW.01, Kel.Kebon Pala, Kec.Makasar Jakarta Timur	1557	6700 m2	RPTRA,PEMADAM KEBAKARAN,GED.SERBAGUN2	
170	Kel. Kebon Pala	Jl.Jengki Cipinang Asem RT.011 RW.04 Kel.Kebon Pala Kec.Makasar Jakarta Timur		1800 m2	Kantor dan Rudin	
171	Kel. Makasar	Jl. GOR Rt 011 Rw 06		1500 m2	Kantor Lurah	
172	Kel. Makasar	Jl. Kerja Bakti Rt 01 Rw 02		310 m2	Rumah Dinas Lurah	
173	Kel. Pinang Ranti	Jl. Raya Pondok Gede RT.008 RW.02 Kelurahan Pinang Ranti		120 m2	Rumah Dinas	
174	Kel. Pinang Ranti	Jl. Kp Pulo RT.003 RW.05 Kelurahan Pinang Ranti		1200 m2	RPTRA Pulo Asri	
175	Kel. Pinang Ranti	Jl. SMA 48 RT.014 RW.01 Kelurahan Pinang Ranti		1200 m2	Kantor Kelurahan Pinang Ranti	
176	Kecamatan Ciracas	Jl. Penganten Ali No. 9 RT 008 RW 006 Kel. Ciracas Kec. Ciracas	hap pakai no 34 dan 17/05/1990	3628 m2	Kantor Kecamatan	
177	Kecamatan Ciracas	Jl. Lapangan Tembak RT 003 RW 002 Kel. Cibubur Kec. Ciracas	NO 34/PIMP.RD.CAM dan 3/11/1995	399 m2	Rumah Dinas Camat Ciracas	
178	Kel. Susukan	Jl. Suci - Rt. 004/03 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur		150 m2	Rumah Dinas Lurah	
179	Kel. Susukan	Jl. H. Baping - Rt. 010/06 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur	SHP No 1 / SUSUKAN dan 23/09/1983	2340 m2	Kantor Kelurahan Susukan	
180	Kel. Rambutan	Jl. H. Jeni Rt. 012 Rw. 01 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas		150 m2	Rumah Dinas	
181	Kel. Rambutan	Jl. H. Jeni Rt. 012 Rw. 01 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas		84 m2	Sekretariat RW 01	
182	Kel. Rambutan	Jl. Gudang Air No. 36 Rt. 005 Rw. 02 Kelurahan Rambutan Kecamatan	No. 33 Tahun 1985 dan 6/8/1986	3106 m2	Kantor Lurah	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
183	Kel. Kelapa Dua Wetan	Jl. Kelapa Dua Wetan Rt.005/08	5 dan 28/03/1981	150 m2	Kantor Sekretariat RW 08	
184	Kel. Kelapa Dua Wetan	Jl. Kelapa Dua Wetan Rt.001/06		300 m2	Rumah Dinas	
185	Kel. Kelapa Dua Wetan	Jl. PKP Rt.001/08		1590 m2	Kantor Lurah	
186	Kel. Kelapa Dua Wetan	Jl. Kampung Baru RT.008/02		300m2	Kantor Sekretariat dan Serba Guna RW	
187	Kel. Ciracas	Jl Raya Ciracas Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur	13 dan 28/03/1981	4196 m2	Kantor Kelurahan Ciracas	
188	Kel. Cibubur	Perumahan Cibubur	05157/X/1984	5310 m2	Lahan Masjid Lokasi IV	
189	Kel. Cibubur	Perumahan Cibubur	05157/X/1984	4325 m2	Lahan SUK Lokasi IV	
190	Kel. Cibubur	RT 002 RW 004 Kelurahan Cibubur		450 m2	Rumah Dinas	
191	Kel. Cibubur	Jl. Raya Lapangan tembak RT 005 RW 02 Kelurahan Cibubur	dan 28/12/2024	2626 m2	Kantor Lurah	
192	Kecamatan Cipayung	Jl. Raya Cilangkap Rt 004 Rw 01 Kelurahan Cilangkap		800 m2	Rumah Dinas	
193	Kecamatan Cipayung	Jl Bina Marga No 2 Rt 006 Rw 02 Kelurahan Cipayung		6000 m2	Kantor Camat	
194	Kel. Lubang Buaya	JL. SPG 7 rt006/09		1500 m2	Kantor Lurah	
195	Kel. Lubang Buaya	L.Buaya RT003/02		2006 m2	Puskesmas kelurahan	
196	Kel. Bambu Apus	Jl. Mini III Rt. 012 RW. 003 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Kode Pos. 13890	3 dan 28/03/1981	2578 m2	Kantor Kelurahan	
197	Kel. Setu	Rt 006/01		475 m2	Rumah Dinas	
198	Kel. Setu	Rt 005/01		1390 m2	Kantor Lurah	
199	Kel. Setu	Rt 006/05		360 m2	Perpustakaan	
200	Kel. Setu	RT 006/05		360 m2	SKKT	
201	Kel. Cipayung	Jl Pinang Rt 001 Rw 04 Kelurahan Cipayung		207 m2	RUMAH DINAS LURAH	
202	Kel. Cilangkap	Jl. Cipayung Setu RT. 007/04 Kelurahan Cilangkap		200 m2	Rumah Dinas	
203	Kel. Cilangkap	Jl. As-syafi'iyah RT. 003/03 No 1		3000 m2	Kantor Lurah	
204	Kel. Munjul	Gg. Kapuk No. 5 RT. 006 RW. 07 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas, JakTim		200 m2	Rumah Dinas	
205	Kel. Munjul	Jl. Buni RT. 001 RW. 04	P.1/1981 dan 28/03/1981	200 m2	Kantor Lurah	

NO.	UNIT KERJA	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
206	Kel. Munjul	Jl. Buni RT. 001 RW. 04		1000 m2	Kantor Dekel	
207	Kel. Pondok Ranggon	Jl. Raya Ganceng RT. 001 RW.04	Hak Pakai No. 6 dan 28/03/1981	3055 m2	Tanah Kantor	
208	Kel. Pondok Ranggon	Jl. Kel.Pd Ranggon Rt.02/03		306.58 m2	Tidak Digunakan	
209	Kel. Ceger	Jl. SMP 160 RT 002 RW 05 Kelurahan Ceger		1080 m2	Kantor Kel. Ceger	

VII. ASSET LAINNYA (WALIKOTA)

NO.	JENIS ASSET	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
				RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Roda 4						
	a. Mobil	2003-2019	17				
	b. Bis						
	c. Truk						
	d. dll						
2	Kendaraan Roda 2						
	a. Sepeda motor	2005-2019	7	1			
	b. Gernor						
	c. dll						
3	Kapal Dinas						
4	Fork lift						
5	AC Chiller		11	1	3		
6	AC Split		35				
7	AC Split Duck		31				
8	AC Portable		10				
9	Komputer		155	70			
10	Genset		1				
11	Printer		108	50			
12	APAR		104				
	Dll						

II.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2018-2021

II.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Gambaran capaian indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam 5 (lima) Tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021. Adapun gambaran capaian indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Nama Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Sasaran Strategis										
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan serta Peningkatan Produktivitas dan Integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	-	78	85	-	-	76,54	85
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai	83	83	86	86	91,3	89,2	86,1	92,8
Program										
Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase	-	100	100	100	-	93,8	97,9	100
	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	-	100	100	100	-	97,9	99,9	100
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100

Nama Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	> 80 %									
	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase	86,61	87,61	88,61	89,61	88	72,9	84,4	TAD Nilai
	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	Persentase	-	100	100	100	-	77,9	134,1	107,2
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	Persentase	-	100	100	100	-	100	100	100
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Indeks	-	3	3	4	-	4	3	4
	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	3	3	3	4	3	3	3	4

Nama Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan yang Tertata	Kawasan	-	3	2	2	-	-	-	-
	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	Gedung	-	66	69	72	-	66	66	66
	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	3	4	4	4	4	4
<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks	-	3	3	3	-	4	3	4

Sumber : LKIP Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021

Berdasarkan table di atas, capaian indikator tujuan (Indeks Reformasi Birokrasi) dan indikator sasaran (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2018 - 2021 telah mencapai target.

II.3.2 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2018-2021

Tabel 2.7 Realisasi Program Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2018-2021

Program	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara realisasi dan Anggaran (%) pada tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur		305,605,343,833	251,139,184,869	-		291,824,749,496	250,034,908,345	-		95.49	99.56	-
Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur		7,407,332,221	1,103,955,785	-		5,917,903,855	1,103,155,785	-		79.89	99.93	-
Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur		500,765,735,201	421,588,982,350	-		479,795,648,171	406,663,066,474	-		95.81	96.46	-
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur	93,380,680,635	135,896,278,035	59,239,472,967	-	77,561,975,723	116,936,380,125	56,309,259,785	-	83.06	86.05	95.05	-
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur	5,030,575,567	12,139,154,958	7,010,651,680	-	3,600,478,230	7,750,502,820	5,200,113,833	-	71.57	63.85	74.17	-
Program Penyelenggaraan Kota Adm Jakarta Timur	703,030,098,565			-	671,756,781,761			-	95.55			-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				70,546,025,098				66,192,011,263				93.83
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3,500,520,604				3,237,004,485				92.47
Program Pengelolaan Kecamatan				588,012,715,052				576,646,471,976				98.07
Program Pengelolaan Kota Administrasi				11,138,343,707				9,266,969,141				83.20
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				489,911,010,623				475,626,792,601				97.08

Sumber : <https://sipjm19.bapedadki.net/> dan <https://monev.bapedadki.net/>

Berdasarkan Tabel diatas, Program yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rentang tahun 2018-2021 mengalami beberapa kali penyesuaian, Pada tahun 2018 menggunakan Program Transisi Renstra sebelumnya dimana Kota Administrasi Jakarta Timur mengampu 5 (Lima) Program dengan Capaian Realisasi Anggaran tertinggi pada Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 97.39% sedangkan capaian realisasi anggaran terendah pada Program Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 71.57 %.

Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Kota Administrasi Jakarta Timur mengampu 5 (Lima) program sesuai dengan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017-2021. Tahun 2019 capaian program tertinggi adalah Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Capaian 95.81% sedangkan capaian program terendah adalah Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur dengan capaian 63.85%.

Tahun 2020 Capaian program tertinggi Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Capaian 99.93% sedangkan capaian program terendah adalah Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur dengan capaian 74.17%.

Tahun 2021 Program yang diampu Kota Administrasi Jakarta Timur mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga Kota Administrasi Jakarta Timur mengampu 6 (enam) Program, dengan capaian program tertinggi pada Program Program Pengelolaan Kecamatan sebesar 98.07% dan capaian terendah pada Program Program Pengelolaan Kota Administrasi sebesar 83.20%.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Administrasi Jakarta Timur akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Administrasi Jakarta Timur menuntut

adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Timur, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, antara lain adalah:

II.4.1 Tantangan

II.4.1.1 Bencana

Berdasarkan peta bencana Indonesia, terdapat 315 kabupaten/kota yang berada di daerah bahaya banjir dengan jumlah penduduk 61 juta jiwa, dan DKI Jakarta termasuk didalamnya. Dalam konteks Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur persebaran daerah rawan banjir berdasarkan data tahun 2021 meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang ada sebanyak 18 titik. Sedangkan menurut data BPBD Provinsi DKI Jakarta, terdapat sedikitnya 10 titik rawan longsor yang berada di Jakarta, 2 (dua) diantaranya terdapat di Jakarta Timur yakni di Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo. Untuk kejadian pohon tumbang di Jakarta Timur tahun 2021 tercatat 57 kejadian pohon tumbang dan sebanyak 32.980 pohon rawan tumbang dipangkas yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Jumlah Kelurahan yang mengalami bencana Banjir Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Jumlah Kelurahan yang mengalami Bencana Banjir Tahun 2019-2021

Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Pasar Rebo	-	-	-
Ciracas	-	-	1
Cipayung	-	-	5
Makasar	-	3	5
Kramat Jati	3	5	5
Jatinegara	3	3	6

Duren Sawit	-	2	3
Cakung	-	5	5
Pulogadung	-	2	-
Matraman	1	4	3
Kota Jakarta Timur	7	24	33

Sumber : Data BPS Jakarta Timur Tahun 2022

Dalam hal Penanganan Banjir, Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan koordinasi untuk monitoring waduk, situ, embung, sungai, pembuatan Sumur Resapan dan menjalankan program kolaborasi *crossing* saluran di JGC dan Jalan I Gusti Ngurah Rai.

Crossing Saluran I Gusti Ngurah Rai mengatasi genangan di RW 10 Kelurahan Klender dengan Panjang 1.878 m² menggunakan Box Culvert 250 cm x 250 cm dari RW 10 Kelurahan Klender menuju PHB Tegal Amba. Sumber dana dari kegiatan CSR Agung Podomoro.

Sedangkan untuk *Crossing* Saluran di JGC, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh konsultan pengembang terhadap Waduk Site B, debit air akan dikurangi menuju KBT yaitu 40%, dan menuju ke Outlet Babek 60%.

Selain bencana banjir, bencana kebakaran juga kerap terjadi di wilayah Jakarta Timur sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam penanganannya. Berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta yang dikutip dalam data Badan Pusat Statistik Jakarta Timur Tahun 2022, Kota Jakarta Timur memiliki 331 peristiwa kebakaran pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Dengan demikian Kota Administrasi Jakarta Timur perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana banjir dan kebakaran sehingga potensi dan dampak bencana dapat diminimalisir.

Tabel 2.9 Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019-2021

Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Pasar Rebo	39	21	24

Ciracas	38	29	27
Cipayung	55	39	30
Makasar	38	14	19
Kramat Jati	48	28	31
Jatinegara	49	36	35
Duren Sawit	85	60	47
Cakung	127	57	63
Pulogadung	75	49	32
Matraman	27	16	23
Kota Jakarta Timur	577	349	331

Sumber : Data BPS Jakarta Timur Tahun 2022

II.4.1.2 Pandemi Covid

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia termasuk DKI Jakarta khususnya di Jakarta Timur sejak awal tahun 2020. Berdasarkan data trend mingguan Covid-19 yaitu dimulai dari minggu ke-10 (sepuluh) tahun 2020 sampai dengan minggu ke-6 (enam) tahun 2022, Kota Jakarta Timur mengalami 3 gelombang dengan puncak trend tertinggi. Puncak kasus pertama terjadi pada bulan Januari tahun 2021, lalu puncak ke 2 (dua) dibulan Juli 2021 dan puncak ke 3 (tiga) mulai terlihat di akhir Januari 2022. Bila melihat trend tersebut terdapat kurang lebih interval 6 (enam) bulan pada tiap puncaknya. Kenaikan kasus terjadi dikaitkan dengan pergerakan penduduk dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan serta adanya mutasi virus Covid-19.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019, salah satu lingkup tugas yang diatur untuk Kota Administrasi adalah melaksanakan pengoordinasian dan pembentukan Pos Komando (Posko) bencana tingkat Kota administrasi. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut dalam rangka Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koordinasi dengan UPD tingkat Kota, Unsur Kecamatan, dan Unsur

Kelurahan untuk melakukan pembentukan Pos Komando Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan. Perwakilan atau masing – masing Unit Perangkat Daerah atau Satuan Pelaksana masing-masing tingkatan baik Kecamatan maupun Kelurahan (UPD terkait) melakukan Piket Posko yang telah diatur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada Posko Bencana tersebut, terdapat sarana dan prasarana yang diperlukan khususnya dalam hal penanggulangan dan penanganan Covid-19. Dengan adanya Posko tersebut memudahkan untuk melakukan koordinasi lintas sektor maupun penanganan Covid-19 itu sendiri.

Sesuai dengan Instruksi Sekda Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta dan Surat Edaran Sekda Nomor 27 tahun 2020 tentang Implementasi Kegiatan Kampung Siaga Covid-19, Posko yang ada pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan berfungsi memberikan sosialisasi, pengawasan dan penegakkan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid- 19 di wilayah kerjanya masing-masing. Melalui Posko yang terdapat di setiap tingkatan pemerintahan tersebut, maka penanganan Covid- 19 dapat menyentuh langsung pada level terendah yaitu RT dan RW. Hal ini sejalan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid- 19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga selalu berkoordinasi dengan Forkopimko tingkat Kota Jakarta Timur dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan penanganan Covid- 19 kepada masyarakat.

Jakarta Timur merupakan salah satu Kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk terbanyak dengan urutan pertama dengan Kota/Kabupaten lainnya. Menurut data BPS hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) per September tahun 2020 jumlah penduduk Jakarta Timur sebanyak 3,04 juta jiwa atau 28,76% dari Penduduk DKI Jakarta dengan 10,56 juta jiwa. Dengan kepadatan penduduk tersebut, ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jakarta Timur. Perlu kebijakan strategis dalam

permasalahan tersebut, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kunci sukses dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jakarta Timur.

Kebijakan strategis tersebut diantaranya adalah Penerapan Protokol Kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak, Menghindari kerumunan serta Mengurangi mobilitas), Peningkatan 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*) dan *Active Case Finding* (ACT), Percepatan pelaksanaan program vaksinasi, serta kolaborasi antara berbagai pihak (Pemerintah, TNI, Polri, Satgas Covid dari tingkat kota sampai tingkat RT/RW, Swasta, dsb) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jakarta Timur ini.

II.4.1.3 Penurunan Pendapatan Masyarakat Pasca Pandemi

Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun yang memberikan dampak dan perubahan yang besar bagi perekonomian Indonesia tidak terkecuali bagi Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pandemi akibat Covid-19 membuat Pemerintah mengambil keputusan sulit untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut berdampak cukup serius terhadap perekonomian dimana adanya pembatasan usaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Jakarta Timur sehingga mendorong gelombang PHK maupun pengurangan jam kerja. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta melambat dan bahkan mengalami kontraksi.

Pemulihan ekonomi merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Perlu dilakukan percepatan untuk membangkitkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menghadapi krisis saat pandemic dan masa depan yang tidak menentu.

Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan kedepannya dan memastikan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang memiliki daya saing di pasar global.

Dari sekitar kurang lebih 64 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di

Indonesia baru 13% saja yang telah terhubung ke ekosistem digital dan sebanyak 87% masih sangat tergantung pada interaksi fisik dikarenakan tidak mempunyai telepon seluler, tidak punya komputer, hingga tidak punya paket pulsa atau internet dan lain-lain. Untuk itu perlu menggandeng kolaborator sebagai mitra Kota Administrasi Jakarta Timur untuk berkolaborasi dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II.4.1.4 Kondisi Macet

Berbagai cara dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Kota Jakarta antara lain adalah pembangunan jalan, aturan ganjil genap dan menggalakkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Salah satu transportasi masal adalah Bus Trans Jakarta (Busway). Selama tahun 2020, Bus Trans Jakarta yang melewati jalur di wilayah Jakarta Timur (7 koridor) melayani 37,29 juta penumpang, menurun 49,64 persen dibanding tahun lalu yang sebanyak 74,04 juta penumpang.

Dalam hal penanganan kemacetan di Jakarta Timur, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dalam beraktifitas. Sarana dan prasarana penunjang seperti Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) telah dibangun dan diperbaharui dalam rangka menunjang mobilisasi masyarakat.

II.4.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan suatu pemerintahan adalah jika Pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga negaranya dan diharapkan dapat menekan serta mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2020, nilai TPT di Jakarta Timur adalah sebesar 9,29 persen, dampak dari pandemi Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2020 menyebabkan angka TPT ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK

menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka TPAK Jakarta Timur tahun 2020 adalah 61,98 persen.

II.4.1.6 Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Pada tahun 2021, Polres Metro Jakarta Timur telah menyelesaikan 2.008 kasus dari total laporan sebanyak 2.678 kasus. Tingkat penyelesaian adalah sebesar 75% dimana kendala yang dihadapi adalah kurangnya saksi dan bukti dari laporan tersebut. Laporan dan penyelesaian kasus terbanyak selama tahun 2021 di wilayah Jakarta Timur adalah kasus narkoba dan pencurian sepeda motor.

Gangguan keamanan dan ketertiban lainnya adalah aksi tawuran di Jakarta Timur yang mulai meresahkan warga dikarenakan pelaku tawuran membawa senjata tajam yang dapat menyebabkan luka dan korban jiwa. Peristiwa tawuran yang terjadi antar pelajar pada umumnya disebabkan oleh konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi ketegangan kelompok. Anak yang masuk dalam kelompok ini tentu akan terkena pengaruh dan ikut dalam perkelahian. Dampak dari aksi tawuran ini dapat berupa kerusakan sarana dan prasarana, luka berat hingga kematian pada pelaku.

Dalam menangani kondisi ini diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam bekerjasama memberikan sanksi-sanksi dan penanaman nilai-nilai moral kepada pelaku aksi tawuran.

II.4.2 Peluang

II.4.2.1 Peraturan Perundangan yang mendukung Pelayanan Kota

Administrasi Jakarta Timur

Adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur. Lebih lanjut, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur. Keputusan Gubernur tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilimpahkan dan atau tetap berada di tingkat Provinsi. Dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada

Kota/Kabupaten adalah kewenangan pelayanan publik yang bersifat koordinasi pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Timur, pembinaan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

II.4.2.2 Peran Aktifitas Perekonomian

Ditinjau dari besaran kontribusi PDRB Jakarta Timur terhadap total PDRB kabupaten/kota se-DKI Jakarta selama tahun 2018-2021 yang berada di kisaran 17%, dapat dikatakan bahwa perkembangan aktivitas perekonomian Jakarta Timur cukup mempengaruhi kondisi perekonomian DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Timur mengalami penurunan sehingga diperlukan percepatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Digitalisasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan Jumat Beli Lokal yang diluncurkan pada akhir Tahun 2021 telah menghasilkan omset sebesar Rp.107.567.000,- dengan jumlah Jakpreneur 102 peserta. Melalui Jumat Beli Lokal, Kota Administrasi Jakarta Timur mengajak masyarakat dan ASN untuk mendukung para pelaku UMKM dengan membiasakan diri menggunakan produk lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dalam rangka mendukung pemasaran produk Jakpreneur dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Jakpreneur berkolaborasi dengan *Jakarta Experience Board* (JXB) menyelenggarakan pameran online Jumat Beli Lokal. Jumat Beli Lokal merupakan pameran online produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan pada hari Jumat dengan produk yang ditawarkan merupakan produk unggulan yang diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Jakarta Timur dengan produk yang ditawarkan mulai dari makanan, pakaian hingga kriya.

Pelatihan Kewirausahaan juga diberikan oleh berbagai pihak antara lain adalah Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Baznas DKI, PT Antam, Bank DKI, Raja IT dan pihak swasta lainnya dengan jumlah peserta lebih dari 830 orang. Sedangkan untuk bantuan permodalan warung telah diberikan sebanyak 86 gerobak.

Selain itu, pemberian Gerobak Jakpreneur Kepada Tuna Netra dan Marbot Masjid di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wujud komitmen dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

Adapun jumlah Jakpreneur sebanyak 2.476 UMKM yang terlibat merupakan binaan dari 7 pengampu dinas teknis terkait seperti :

1. Sudin PPKUKM
2. Sudin KPKP
3. Sudin Sosial
4. Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Sudin Parekraf
6. Sudin PPAPP
7. Dekranasda

Dalam rangka digitalisasi UMKM, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga mewajibkan seluruh kegiatan makan dan minum rapat memanfaatkan pengadaan tersebut melalui aplikasi e-order pada tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

II.4.2.3 Adanya Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat bermakna terdapat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk merespon hal-hal terkait pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perkembangan lainnya seiring dengan meningkatnya urbanisasi.

Adanya partisipasi masyarakat bermakna terdapat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk merespon hal-hal terkait pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan Rembuk RW setiap tahun di Jakarta Timur yang melibatkan warga untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan riil warga yang kemudian diajukan dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi. Hal tersebut merupakan wujud partisipasi

masyarakat di DKI Jakarta, khususnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Adanya partisipasi masyarakat ini menjadi modal sosial dalam mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur juga dapat dilakukan melalui kanal-kanal pengaduan yang telah tersedia. Dari 14 kanal pengaduan yang tersedia, Kanal Pengaduan JAKI merupakan kanal pengaduan yang paling sering digunakan oleh warga dengan lima besar kategori laporan yang paling banyak dilaporkan yaitu kategori Parkir Liar, Bantuan Sosial, Sampah, dan Jalan. Berdasarkan data *Citizen Relationship Management* (CRM) pada Maret 2021 yang dikelola Jakarta Smart City, wilayah yang paling banyak mengirimkan laporan permasalahan adalah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total 689 laporan. Kemudian disusul Jakarta Selatan (638 laporan), Jakarta Barat (402 laporan), Jakarta Pusat (363 laporan), dan Jakarta Utara (218 laporan). Laporan kanal pengaduan ini membuktikan bahwa partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk sama-sama menciptakan Jakarta yang lebih baik. Jembatan komunikasi dua arah ini diharapkan dapat terus terjalin untuk menciptakan kota yang maju dan kolaboratif. Untuk keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Kota Jakarta Timur terus mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif melalui kanal yang tersedia.

Selain pembangunan fisik yang dilakukan, pembangunan nonfisik juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun pembangunan nonfisik dapat berupa pelatihan keterampilan, pengembangan SDM dan lain sebagainya. Usulan pembangunan nonfisik telah diajukan melalui kegiatan Musrenbang dan dapat lebih dioptimalkan untuk kedepannya dalam rangka mendukung terciptanya kota yang berkelanjutan atau *sustainability city*. Sebuah kota bisa dikatakan berkelanjutan jika memperhatikan keseimbangan harmonis antara perkembangan kotanya dengan perkembangan lingkungannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu diselaraskan dengan isu-isu strategis yang disampaikan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 - 2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

III.1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Kota

Administrasi Jakarta Timur

Sebagaimana Tabel tentang pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2018-2021 pada bab sebelumnya, bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Terdapat beberapa capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang belum mencapai target, sehingga terdapat *gap* atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan Makro Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Dalam kerangka Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta

mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan	<ol style="list-style-type: none"> Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap beberapa pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> dalam penyelesaian persoalan; Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya <i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti. 	Terbatasnya Kewenangan pelayanan teknis di wilayah kota administrasi Jakarta Timur

B. Permasalahan Pelayanan Pada Masing-Masing UKPD di Kota Administrasi Jakarta Timur

Permasalahan pada pembahasan ini terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pelayanan per UKPD di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penjabaran lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian/Kec/Kel	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kualitas Bangunan kantor Kecamatan, Kelurahan, dan Rumah dinas; Masih perlunya Peningkatan Pemahaman Tugas dan Fungsi Lembaga Masyarakat; Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum; Kualitas pelayanan Kecamatan dan Kelurahan belum Optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas; Mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat RT, RW, dan LMK; Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum; Mengoptimalkan Pembinaan dan Evaluasi Terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
2	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan di bidang hukum; Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia; Sarana dan prasarana Kantor yang kurang memadai; SDM bidang hukum yang masih kurang ; Anggaran penanganan perkara bersifat flexibel sesuai kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kota; Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota; Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi Manusia; Mengusulkan sarana dan prasarana kantor agar memadai; Mengusulkan penempatan SDM yang menguasai bidang hukum termasuk diklat hukum; Anggaran bersifat flexibel sesuai kebutuhan.
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Belum maksimal nilai capaian dalam penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kota Adm. Jakarta Timur; Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada kegiatan di tingkat Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; Belum optimalnya pegawai dalam tingkat profesionalisme ASN 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap peraturan tentang waktu tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sehingga masih ada beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang lambat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang ditandai dengan melewati batas waktu maksimal tindak lanjut laporan; Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap SOP di tingkat Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan; Kurangnya pemahaman pegawai dalam aturan kepegawaian.

No	Bagian/Kec/Kel	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
4	Bagian Perekonomian	Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat kota administrasi jakarta Timur; 3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan kota administrasi Jakarta Timur; 4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi kota administrasi Jakarta Timur; 5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Timur.
5	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Timur
6	Bagian Umum dan Protokol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas makanan yang tersedia di E-Order; 2. Penurunan kualitas sarana dan prasarana pendukung kantor; 3. belum optimalnya Perencanaan, pemeliharaan dan perawatan barang/aset termasuk perlengkapan / peralatan kerja; 4. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi E-Office Surat Masuk dan Surat Keluar; 5. Belum maksimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis di SKPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kualitas makanan yang tersedia di E-Order; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kantor; 3. Mengoptimalkan Perencanaan, pemeliharaan dan perawatan barang/aset termasuk perlengkapan / peralatan kerja; 4. Memaksimalkan penggunaan aplikasi E-Office Surat Masuk dan Surat Keluar; 5. Memaksimalkan penyelenggaraan kearsipan dinamis di SKPD.
7	Bagian Keuangan	Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; 2. Peningkatan pengoordinasian evaluasi SAKIP dan

No	Bagian/Kec/Kel	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan laporan keuangan.</p>
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	<p>1. Belum Optimalnya Koordinasi lintas sektor terkait Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta Timur.</p> <p>2. Belum tercapainya 100 % ODF di Jakarta timur untuk menuju kota sehat.</p> <p>3. Masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan</p>	<p>1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota;</p> <p>2. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk pencapaian 100% ODF dengan pembuatan jamban/ IPAL komunal di Jakarta timur melalui APBD dan CSR;</p> <p>3. Mengoptimalkan pelayanan keagamaan.</p>
9	Kecamatan	<p>1. Belum optimalnya teknis pelaksanaan musrenbang,</p> <p>2. Peningkatan kualitas FKDM,</p> <p>3. Belum optimalnya kegiatan keolahragaan dan kebudayaan masyarakat,</p> <p>4. Peningkatan kualitas pelayanan, ketentraman dan ketertiban.</p>	<p>1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan;</p> <p>2. Mengoptimalkan kinerja FKDM;</p> <p>3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan dan kebudayaan tingkat kecamatan</p> <p>4. Mengoptimalkan pelayanan, ketentraman dan ketertiban;</p>
10	Kelurahan	<p>1. Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan, ketentraman dan ketertiban,</p> <p>2. peningkatan peran RT,RW,LMK,</p> <p>3. peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan,</p> <p>4. peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan,</p> <p>5. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan (posyandu, PSN),</p> <p>6. Belum optimalnya kegiatan keolahragaan dan kebudayaan masyarakat</p> <p>7. peningkatan kinerja PPSU</p>	<p>1. Mengoptimalkan pelayanan, ketentraman dan ketertiban;</p> <p>2. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK;</p> <p>3. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;</p> <p>4. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan;</p> <p>5. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan;</p> <p>6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan dan kebudayaan tingkat kelurahan</p> <p>7. Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.</p>

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

“Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global”

Adapun penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut :

1. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, sertanpusat/perwakilan lembaga internasional.
2. Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tentram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
3. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai social budaya dan fungsinya sebagai manusia.
4. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
5. Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.

6. Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan: i) tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ii) kepemimpinan daerah (leadership) yang dapat menjadi panutan, visioner, kreatif dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan iii) kerjasama, koordinasi dan kebersamaan diantara pemangku kepentingan.

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Misi Satu : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada: prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

Misi Dua : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya

melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada: struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Misi Tiga : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada: perwujudan kesejahteraan social masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan social budaya.

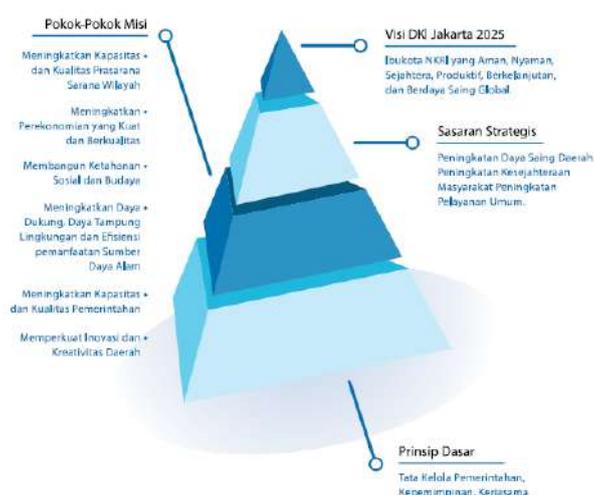
Misi Empat : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada: pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Misi Lima : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik,

peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

Misi Enam : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta. Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

- i) pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat.
- ii) pengembangan ekonomi kreatif, kluster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi
- iii) penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi
- iv) penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif
- v) penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi, dan
- vi) penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Secara skematis rumusan misi dan fokus prioritas dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tujuan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah “Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas” dengan sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat”. Berdasarkan Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026. Dengan demikian arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

Adapun terkait dengan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 5 yakni “*Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan*”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan Misi RPJPD, diuraikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025

No.	Misi RPJPD Tahun 2005-2025 Terkait Peran Kota Administrasi Jakarta Timur	Hambatan Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mewujudkan RPJPD Tahun 2005-2025	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJPD Tahun 2005-2025
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan	Kurangnya kewenangan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelayanan masyarakat	Koordinasi dan kolaborasi dalam pelayanan masyarakat di wilayah kota administrasi Jakarta Timur

III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, arah kebijakan pengembangan kawasan di wilayah Jakarta Timur meliputi 1.000 Danau, Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung, Kawasan Eco Wisata Cipayung, dan Kawasan Cakung Barat Terpadu. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Timur bersama perangkatnya bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama *stakeholder* terkait. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Kawasan 1.000 Danau, Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung, Kawasan Eco Wisata Cipayung, dan Kawasan Cakung Barat Terpadu sebagaimana tertera pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dijelaskan sebagai berikut:

A. Penataan Kawasan 1.000 Danau

Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Pasar Rebo merupakan 3 Kecamatan di Jakarta Timur yang lokasinya saling berbatasan dan pada area tersebut memiliki 24 buah waduk, situ dan embung yang bervariasi luasan *existing*-nya antara 0,4 Ha – 120 Ha dengan total luasan rencana 1.078,1 Ha. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa semua waduk tersebut hanya memegang fungsi sebagai pengendali banjir dengan daerah sempadannya yang belum terbangun optimal. Rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan 1000 Danau dilakukan melalui:

- Fungsi utama waduk sebagai pengendali banjir tetap terjamin, kebersihan waduk akan terjaga, termasuk pemeliharaan dan

pengelolaan air limbahnya;

- Mengembangkan daerah sempadan waduk sebagai RTH yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat memancing, camping ground, tempat bermain anak, jogging track, dll;
- Mengadakan event-event lomba di kawasan 1000 danau;



Gambar 3.2 Kawasan 1.000 Danau
Sumber : Subanpeko Jakarta Timur 2018

B. Penataan Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung

Pengembangan Kawasan Sekolah Kreatif merupakan strategi dalam rangka membentuk “*branding*” yang lebih mantap dalam pengembangan yang bersifat fisik kawasan maupun penjalinan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya sehingga dapat lebih meningkatkan kompetensi lulusan dan produk yang dihasilkannya. Arah yang dituju untuk membentuk “*branding*” Kawasan Sekolah Kreatif adalah:

- membentuk kawasan yang mencerminkan keunggulan dan kasil kreativitas siswa smk
- sebagai model pembentukan berbagai kreativitas kompetensi keahlian siswa smk
- pusat promosi produk kreatif siswa smk

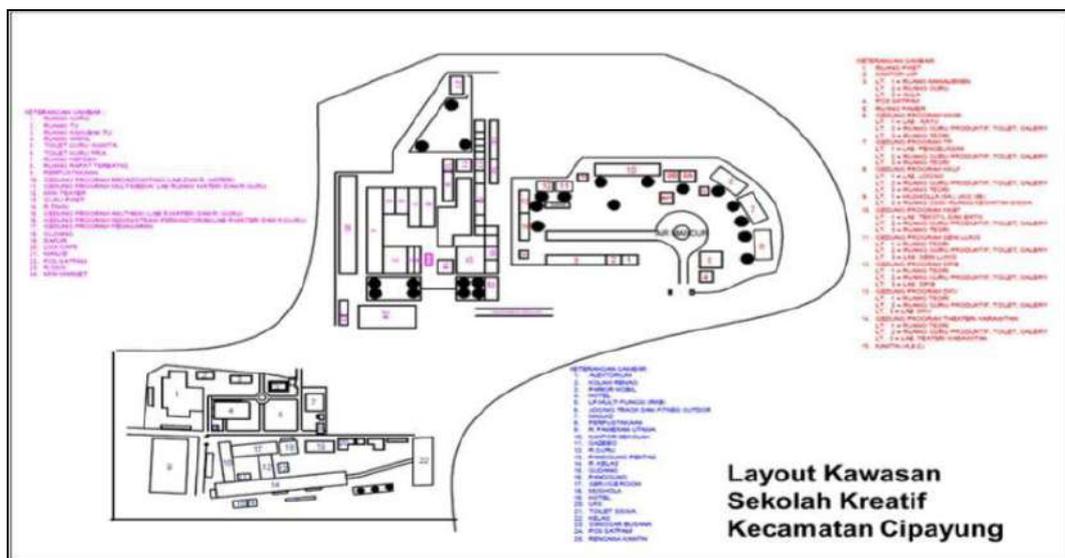
- sebagai model keunggulan SMK

Rencana pengembangan sekolah kreatif dilakukan melalui:

- pengukuhan kawasan sekolah kreatif dan sosialisasinya kepada publik;
- pengembangan networking sekolah kreatif;
- pembangunan akses jalan dan perbaikan infrastruktur lainnya di sekitar Kawasan Sekolah Kreatif;
- Integrasi layanan transportasi Bus Sekolah;
- Pengembangan lainnya untuk mencapai 8 standar nasional Pendidikan



Gambar 3.3 Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayang



Gambar 3.4 Layout Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayang

C. Penataan Kawasan Eco Wisata Cipayung

Kecamatan Cipayung merupakan kecamatan yang terletak di Jakarta Timur sisi selatan yang memiliki karakteristik yang relatif lebih hijau, berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di DKI Jakarta.

Kecamatan Cipayung terdiri dari 8 Kelurahan: Lubang Buaya, Ceger, Cipayung, Munjul, Pondok Ronggon, Cilangkap, Setu, Bambu Apus memiliki luas 2844 Ha. Kecamatan ini memiliki berbagai waduk, taman kota dan taman-taman pemancingan di berbagai sudut, khususnya pada Kelurahan Munjul, Pondok Ronggon, Setu dan Cilangkap terdapat lokasi yang potensial untuk dikembangkan meliputi :

- Agro Wisata Cilangkap di Kel. Cilangkap seluas 50 Ha;
- Hutan Kota Munjul di Kel. Munjul seluas 2.7 Ha;
- Hutan Kota Setu di Kel. Setu seluas 1 Ha;
- Taman Salik di Kel. Pondok Ronggon seluas 0,27 Ha;
- Peternakan Sapi Perah Wisata Cibugari di Kel. Pondok Ronggon seluas 0,2 Ha;
- Waduk Pondok Ronggon di Kel. Pondok Ronggon seluas 1 Ha;
- Waduk Cilangkap di Kel. Cilangkap seluas 50 Ha;
- Waduk Setu di Kel. Setu seluas 3 Ha;
- Taman Cempaka di Kel. Cilangkap seluas 1.2 Ha;
- Taman Flamboyan di Kel. Cilangkap seluas 0.92 Ha;
- Taman Melati di Kel. Cilangkap seluas 1.3 Ha;
- Taman Bluntas di Kel. Cilangkap seluas 1.5 Ha;
- Taman Bambu di Kel. Setu seluas 0.3 Ha;
- Taman Kembang Sepatu di Kel. Setu seluas 0.6 Ha;
- Empang Pemancingan Jl. Harimau Jaya Kel. Munjul seluas 0.6 Ha;
- Empang Pemancingan Jl. Wijaya Kusuma Kel. Munjul seluas 0.3 Ha;

Dengan potensi tersebut, diharapkan kawasan Kecamatan Cipayung dapat lebih dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki ciri khas sebagai kawasan Eco Wisata serta menjadi salah satu pilihan wisata perkotaan sehingga dapat memberikan nuansa berbeda dari wisata

perkotaan pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Cipayung sebagai kawasan Eco Wisata, perlu dilakukan berbagai pembenahan khususnya dari sisi peningkatan infrastruktur seperti:

- Memantapkan dan mensosialisasikan visi kawasan Eco Wisata KecamatanCipayung;
- Perbaikan dan peningkatan waduk, empang pemancingan, taman dan hutan kota dan melengkapi fasilitasnya;
- Perbaikan dan peningkatan jalan dan aksesibilitas menuju waduk, empang pemancingan, taman dan hutan kota;
- Perbaikan dan peningkatan Kawasan Agro Wisata Cilangkap;
- Penerapan shuttle bus antar titik lokasi ecowisata.



Gambar 3.5 Kawasan-Kawasan Eco Wisata Cipayung

III.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambar 3.6 Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan tahap identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, telaahan visi, misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025.



Gambar 3.6 Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

Lebih lanjut disintesis beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKDM	Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT,RW, dan LMK, FKDM	Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	1. Masih perlu dioptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan, 2. Masih perlu dioptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan masyarakat	Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata sosial di Wilayah Jakarta Timur;
3	Kesehatan Masyarakat	1. Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi dalam penanganan pandemi Covid-19 2. Masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terkait Program PHBS	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan Covid dan pengembangan ekonomi;
4	Ekonomi Masyarakat	1. Masih perlu dioptimalkan pengembangan peluang usaha ekonomi 2. Masih perlu dioptimalkan pelatihan keterampilan kerja 3. Masih perlu dioptimalkan pengawasan/ pengembangan aktifitas ekonomi.	
5	Penanganan Banjir	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi bersama seluruh mitra kerja terkait penataan kawasan dalam rangka penanganan banjir 2. Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial)	Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani banjir.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata sosial di Wilayah Jakarta Timur;
3. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan Covid dan pengembangan ekonomi;
4. Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani banjir.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 serta tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Timur			Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5
		1. Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8
		2. Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Nilai	85	86	87	88,5

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Timur harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

/	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Peran aktivitas perekonomian; 3. Adanya partisipasi masyarakat. 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawan Terjadi Bencana 2. Pandemi Covid 3. Penurunan Pendapatan Masyarakat Pasca Pandemi 4. Kondisi Macet 5. Tingkat Pengangguran Terbuka 6. Gangguan Keamanan dan Ketertiban
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa; b. Adanya Komitmen Pimpinan; c. Adanya sumber daya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan; d. Memiliki informasi terpadu pelayanan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik; b. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya; 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan bencana; b. Mengoptimalkan kolaborasi dengan Satgas Covid dari tingkat Kota sampai tingkat RT/RW, Swasta dan lintas sektor; c. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi;

	<ul style="list-style-type: none"> d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru; e. Melakukan pembinaan, pengawasan pembentukan wirausaha baru dan melakukan evaluasi demi tercapainya peningkatan jumlah wirausaha baru; f. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKDM; d. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik; e. Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten.
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Kewenangan Wilayah; b. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima; 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat; b. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lambaga sosial kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri; c. Peningkatan dan Pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai; d. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur; b. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, serta keamanan dan ketertiban kota

V.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

V.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan;
4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangkamenengah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur

Tujuan RPD : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
Sasaran RPD : Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Renstra Kota Jakarta Timur :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur; 3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan; 4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN

Rencana program/ kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perangkat daerah unit pembantu Gubernur. Program yang dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari:

Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026

- 1. Program Pengelolaan Kota Administrasi, dengan kegiatan :**
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi;

- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:**
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3. Program Pengelolaan Kecamatan, dengan kegiatan :**
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi;
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten;
 - c. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kegiatan:**
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- 5. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Lebih lanjut Rekap Jumlah Program, Indikator Program, Unit Pelaksana dan Jumlah Kegiatan Per Program disajikan dalam Tabel 6.1. Adapun Secara terperinci Uraian seluruh program, kegiatan, indikator beserta pagu indikatif disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.1 Rekap Jumlah Program, Indikator Program, Unit Pelaksana dan Jumlah Kegiatan Per Program

No	Program	Indikator	Unit Pelaksana	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum	1 Kegiatan
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Adminnistrasi Dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan	7 Kegiatan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Asisten Administrasi Dan Kesra, Kepala Bagian Umum Dan Protokol, Kepala Bagian Keuangan, Camat, Lurah	
3	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik, Camat, Lurah	4 Kegiatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik, Camat, Lurah	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Asisten Administrasi Dan Kesra, Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik, Camat, Lurah	2 Kegiatan
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik, Camat, Lurah	1 Kegiatan

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KOTA DINAMIS, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	724.164.020.757	87,3	783.747.560.587	87,85	821.158.919.168	89,5	874.723.084.321	89,5	3.203.793.584.833		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	0	88,5	724.164.020.757	88,6	783.747.560.587	88,7	821.158.919.168	88,8	874.723.084.321	88,8	3.203.793.584.833		
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	594.176.982.575	4	645.749.387.364	4	674.536.887.190	4	719.043.079.729	4	2.633.506.336.858	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	1.671.347.440	4	1.792.108.972	4	1.920.617.517	4	2.395.563.605	4	7.779.637.534	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1.671.347.440	1	1.792.108.972	1	1.920.617.517	1	2.395.563.605	4	7.779.637.534	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	320.800.927.803	4	346.028.008.635	4	373.207.831.397	4	402.842.774.946	4	1.442.879.542.781	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	320.800.927.803	12	346.028.008.635	12	373.207.831.397	12	402.842.774.946	48	1.442.879.542.781	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	268.814.679.645	4	292.627.736.224	4	296.011.689.350	4	310.644.037.171	4	1.168.098.142.390	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	0	3312	6.126.345.352	3312	6.613.986.125	3312	7.093.643.280	3312	7.558.855.711	13248	27.392.830.468	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7.01.02.6. 02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	9.299.709.900	12	9.756.111.410	12	10.251.557.756	12	10.772.037.522	48	40.079.416.588	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6. 02.04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lemba ga	0	9369	237.763.142.498	9369	248.554.177.373	9369	260.572.717.692	9369	272.991.095.244	9369	1.019.881.132.807	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6. 02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	5.387.564.924	4	5.770.188.414	4	6.158.256.047	4	6.569.429.061	16	23.885.438.446	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6. 02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	2.104.630.462	1	2.320.839.512	1	2.515.951.686	1	2.740.510.252	4	9.681.931.912	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6. 02.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1.847.953.428	1	2.050.124.785	1	2.167.695.726	1	2.346.175.718	4	8.411.949.657	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6. 02.08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	0	0	-	1	10.564.939.700	0	-	0	-	1	10.564.939.700	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6. 02.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	6.285.333.081	1	6.997.368.905	1	7.251.867.163	1	7.665.933.663	4	28.200.502.812	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6. 04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	4	4	2.890.027.687	4	5.301.533.533	4	3.396.748.926	4	3.160.704.007	4	14.749.014.153	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7.01.02.6.04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.782.084.000	12	1.921.842.400	12	2.075.576.640	12	1.987.375.384	48	7.766.878.424	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	394.526.870	4	429.002.231	4	467.369.529	4	413.787.580	16	1.704.686.210	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	713.416.817	1	780.288.902	1	853.802.757	1	759.541.043	4	3.107.049.519	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	-	1	2.170.400.000	0	-	0	-	1	2.170.400.000	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	124.947.446.172	4	132.587.988.985	4	140.934.411.741	4	149.665.169.057	4	548.135.015.955	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	108.175.802.000	4	114.597.580.862	4	121.670.504.176	4	129.306.198.004	4	473.750.085.042	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pok-mas / Ormas	0	10628	108.175.802.000	10628	114.597.580.862	10628	121.670.504.176	10628	129.306.198.004	10628	473.750.085.042	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Nilai	4	4	16.771.644.172	4	17.990.408.123	4	19.263.907.565	4	20.358.971.053	4	74.384.930.913	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Lemba ga Kemasyarakatan	2	2	15.140.327.700	2	16.227.728.630	2	17.372.478.748	2	18.327.667.981	2	67.068.203.059	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lemba ga Kemasyarakatan	0	577	1.631.316.472	577	1.762.679.493	577	1.891.428.817	577	2.031.303.072	577	7.316.727.854	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	5.039.592.010	4	5.410.184.238	4	5.687.620.237	4	6.014.835.535	4	22.152.232.020	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7.01.04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100	5.039.592.010	100	5.410.184.238	100	5.687.620.237	100	6.014.835.535	100	22.152.232.020	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.01.04.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	5.039.592.010	4	5.410.184.238	4	5.687.620.237	4	6.014.835.535	16	22.152.232.020	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KOTA DINAMIS, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	567.615.352.735	87,3	549.426.585.476	87,85	561.665.530.091	89,5	569.117.642.346	89,5	2.247.825.110.648		
1,1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	85	567.615.352.735	86	549.426.585.476	87	561.665.530.091	88,5	569.117.642.346	88,5	2.247.825.110.648		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	36	44	565.041.308.541	51	546.688.728.467	56	558.746.869.386	62	565.922.660.394	62	2.236.399.566.788	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN KEUANGAN	
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggara an Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	4	4	398.456.207.657	4	408.443.074.841	4	418.685.105.372	4	429.239.477.517	4	1.654.823.865.387	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															BAGIAN KEUANGAN	
7.02.01.1. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	906	834	397.943.220.263	783	407.891.800.769	736	418.089.095.788	700	428.541.323.182	3053	1.652.465.440.002	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengevaluasian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengevaluasian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Doku men	0	76	512.987.394	76	551.274.072	76	59.009.584	76	698.154.335	304	2.358.425.385	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
7.02.01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	4	4	245.000.000	4	280.000.000	4	611.500.000	4	644.650.000	4	1.781.150.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Doku- men	0	1	245.000.000	1	280.000.000	1	611.500.000	1	644.650.000	4	1.781.150.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	4	4	992.128.352	4	876.461.578	4	927.571.761	4	957.824.525	4	3.753.986.216	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	21	259.116.568	16	152.614.956	17	170.292.112	21	208.576.669	75	790.600.305	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	9	733.011.784	9	723.846.622	12	757.279.649	11	749.247.856	41	2.963.385.911	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	4	4	26.766.766.688	4	28.011.460.730	4	29.943.904.094	4	31.684.391.501	4	116.406.523.013	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	76	905.677.474	76	958.906.291	76	1.064.107.990	76	1.086.380.369	304	4.015.072.124	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	144	8.132.480.274	144	8.273.645.670	144	8.836.139.382	144	9.393.068.497	576	34.635.333.823	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
7.02.01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	76	1.631.049.119	76	1.685.353.058	76	1.794.862.482	76	1.907.839.543	304	7.019.104.202	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	76	1.722.703.422	76	1.804.216.006	76	1.923.966.177	76	2.060.423.307	304	7.511.308.912	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	144	1.352.469.805	144	1.513.864.036	144	1.567.326.243	144	1.660.247.232	576	6.093.907.316	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	76	76	7.694.194.579	76	8.166.533.798	76	8.751.523.920	76	9.301.351.692	304	33.913.603.989	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor- an	4	4	3.826.917.852	4	3.972.020.991	4	4.266.171.803	4	4.412.321.554	16	16.477.432.200	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan	Lapor- an	0	4	1.127.522.095	4	1.251.653.609	4	1.343.913.969	4	1.452.826.949	16	5.175.916.622	BAGIAN PEREKONOMIAN	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		Konsultasi SKPD														
															BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku- men	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.01.1. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku- men	0	1	173.752.068	1	185.267.271	1	195.892.128	1	209.932.358	4	764.843.825	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	29.986.846.132	4	10.255.525.872	4	15.573.216.332	4	9.258.604.907	4	65.074.193.243	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	26	1.769.380.433	24	1.598.464.977	26	1.572.562.324	26	1.578.179.727	102	6.518.587.461	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
																KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	467	5.685.898.588	333	3.977.396.255	267	4.386.592.382	267	3.810.553.115	1334	17.860.440.340	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA	
																KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
																KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	13.000.000.000	0	-	1	5.000.000.000	1	2.850.000.000	3	20.850.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA	
																BAGIAN PEMERINTAHAN	
7.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	8	8.699.649.142	6	4.117.442.652	6	3.867.268.653	6	493.295.053	26	17.177.655.500	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA	
																KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
																KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	92	831.917.969	89	562.221.988	85	746.792.973	83	526.577.012	349	2.667.509.942	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	
																KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	54.104.258.760	4	55.583.867.943	4	58.768.172.639	4	60.610.739.794	4	229.067.039.136	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
																KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
																KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	68.994.671	12	75.894.138	12	83.483.551	12	91.831.907	48	320.204.267	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	
7.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	27.723.256.247	12	27.547.938.588	12	28.944.688.090	12	29.729.886.927	48	113.945.769.852	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		
7.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4.245.928.268	4	4.558.162.315	4	4.905.115.248	4	5.179.733.535	16	18.888.939.366	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		
7.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	22.066.079.574	12	23.401.872.902	12	24.834.885.750	12	25.609.287.425	48	95.912.125.651	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
7.02.01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	54.490.100.952	4	43.238.337.503	4	34.237.399.188	4	33.526.972.150	4	165.492.809.793	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	648	648	5.189.862.891	648	5.614.913.938	648	6.044.334.694	648	6.384.438.898	2592	23.233.550.421	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	76	299.156.040	76	268.462.500	76	326.253.065	76	298.963.093	304	1.192.834.698	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	1318	4.156.425.229	1358	4.456.140.610	1358	6.125.788.677	1328	5.026.226.794	5362	19.764.581.310	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
7.02.01.1. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	0	98	35.846.070.819	99	25.020.279.337	98	13.189.995.846	98	13.268.614.287	393	87.324.960.289	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
7.02.01.1. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	0	71	6.606.271.022	71	5.343.470.767	74	5.616.332.153	74	5.544.520.895	290	23.110.594.837	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.01.1. 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	0	387	2.392.314.951	387	2.535.070.351	390	2.934.694.753	390	3.004.208.183	1554	10.866.288.238	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.574.044.194	86	2.737.857.009	87	2.918.660.705	88,5	3.194.981.952	88,5	11.425.543.860	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
															BAGIAN HUKUM	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN PEREKONOMIAN	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
																BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di atas 80%	Persen	100	100	2.574.044.194	100	2.737.857.009	100	2.918.660.705	100	3.194.981.952	100	11.425.543.860		BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
																BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
																BAGIAN PEREKONOMIAN	
																BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
																BAGIAN KEUANGAN	
																BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
																BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100			BAGIAN HUKUM	
7.02.02.6.03.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lemba ga	9367	2342	73.680.000	2342	81.048.000	2342	89.152.800	2341	98.068.080	9367	341.948.880		BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Doku- men	0	4	15.000.000	4	16.000.000	4	17.000.000	4	18.000.000	16	66.000.000		BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Doku- men	0	4	8.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	4	11.000.000	16	38.000.000		BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
7.02.02.6. 03.04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Doku- men	0	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	16	46.000.000	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6. 03.05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Doku- men	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	4	18.000.000	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6. 03.06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Lapor- an	4	4	3.240.000	4	3.240.000	4	3.402.000	4	3.402.000	16	13.284.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6. 03.07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Lapor- an	1	1	8.640.000	1	8.640.000	1	9.072.000	1	9.072.000	4	35.424.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6. 03.08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Doku- men	4	4	2.160.000	4	2.160.000	4	2.160.000	4	2.160.000	16	8.640.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6. 03.09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Doku- men	4	4	431.850.045	4	431.850.045	4	431.850.045	4	431.850.045	16	1.727.400.180	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6. 03.10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Doku- men	4	4	395.960.000	4	395.960.000	4	395.960.000	4	395.960.000	16	1.583.840.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6. 03.11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Doku- men	2	2	10.440.000	2	11.484.000	2	12.632.400	2	13.895.640	8	48.452.040	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000	8	92.820.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	4.240.000	2	4.664.000	2	5.130.400	2	5.643.440	8	19.677.840	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	1	1	5.580.000	1	6.138.000	1	6.751.800	1	7.426.980	4	25.896.780	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	1	1	57.029.500	1	62.732.450	1	69.005.695	1	75.906.265	4	264.673.910	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	1	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	173.030.000	4	603.330.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	4	4	172.250.000	4	189.475.000	4	208.422.500	4	229.264.750	16	799.412.250	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	12.600.000	1	12.600.000	1	12.600.000	1	12.600.000	4	50.400.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	4	4	17.000.000	4	18.000.000	4	19.000.000	4	21.000.000	16	75.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satu- an	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
		Bangunan															
7.02.02.6. 03.24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Doku- men	2	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.835.000	2	2.835.000	8	11.070.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA	
7.02.02.6. 03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Doku- men	4	4	14.400.000	4	15.120.000	4	15.876.000	4	16.020.000	16	61.416.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA	
7.02.02.6. 03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Doku- men	1	1	4.896.000	1	5.130.000	1	5.400.000	1	5.580.000	4	21.006.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA	
7.02.02.6. 03.27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Doku- men	1	1	3.600.000	1	3.960.000	1	4.140.000	1	4.320.000	4	16.020.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA	
7.02.02.6. 03.28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Doku- men	4	4	11.880.000	4	11.880.000	4	11.880.000	4	11.880.000	16	47.520.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA	
7.02.02.6. 03.36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Doku- men	1	1	21.960.000	1	24.156.000	1	26.571.600	1	109.228.760	4	181.916.360	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA	
7.02.02.6. 03.37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Doku- men	4	4	6.750.000	4	6.750.000	4	6.750.000	4	6.750.000	16	27.000.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024		
7.02.02.6.03.38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	20.160.000	4	21.960.000	4	23.760.000	4	25.560.000	16	91.440.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	12	12	976.729.749	12	1.074.402.724	12	1.181.842.996	12	1.300.027.296	48	4.533.002.765	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	2	2	49.958.900	2	54.954.790	2	60.450.269	2	66.495.296	8	231.859.255	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	7.920.000	4	8.712.000	4	9.583.200	4	9.583.200	16	35.798.400	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen	4	4	30.000.000	4	32.000.000	4	35.000.000	4	38.000.000	16	135.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	35.220.000	4	35.220.000	4	35.220.000	4	35.220.000	16	140.880.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.46	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	7.200.000	4	7.920.000	4	8.712.000	4	9.583.200	16	33.415.200	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 - 2026

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun				KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	N/A	86,75	87,3	87,85	89,5	89,5
2.	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	N/A	85	86	87	88,5	88,5
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	N/A	88,5	88,6	88,7	88,8	88,8
4.	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	N/A	85	86	87	88,5	88,5
5.	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	N/A	85	86	87	88,5	88,5
6.	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	N/A	85	86	87	88,5	88,5
7.	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	36	44	51	56	62	62
8.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	4	4	4	4
9.	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4	4	4	4
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4	4	4	4
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Indeks	4	4	4	4	4	4
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4	4	4	4

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan demikian, Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026.

Demi tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026.